
**INDONESIA 2005:
PEREKONOMIAN DI TAMPUK SAUDAGAR
DAN PROYEKSI EKONOMI 2006**

INDEF

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	PEMBELAJARAN DARI THAKSINOMICS DAN “MODEL EKONOMI SAUDAGAR”	7
	2.1. Pengusaha yang jadi Penguasa: Thaksinomics	7
	2.2. Dilema Pengusaha yang Menjadi Penguasa	11
	2.3. Model Ekonomi Saudagar	13
BAB III	INSTABILITAS EKONOMI MAKRO	25
	3.1. Nilai Tukar	25
	3.2. Inflasi	28
	3.3. Suku Bunga	31
	3.4. Pertumbuhan: Ekspor, Investasi dan Konsumsi	33
BAB IV	KEGAGALAN KEBIJAKAN EKONOMI	39
	4.1. Pengangguran dan Disindustrialisasi	40
	4.2. Kemiskinan dan BLT	45
	4.3. Kasus Impor Beras: Kontroversi yang Tidak Produktif	51
BAB V	PENUTUP	65
	5.1. Tantangan dan Masalah ke Depan	65
	5.2. Proyeksi Ekonomi	68

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Perbandingan Makroekonomi Indonesia dan Thailand Periode Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi	21
Tabel 3.1.	Laju Inflasi IHK Bulanan dan Tahunan, Tahun 2005	30
Tabel 3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran	33
Tabel 4.1.	Perkiraan Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT)	43
Tabel 4.2.	Garis Kemiskinan, Persentase dan Jumlah Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan di Indonesia Tahun 1976-2004	46
Tabel 4.3.	Dampak Penurunan Subsidi BBM dan Transfer Langsung Kepada Rakyat Miskin (Perubahan persentase)	50
Tabel 4.4.	Kinerja Produktivitas dan Impor Beras, 1990-2005	55
Tabel 5.1.	Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2006	74

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Perbandingan Ekonomi Indonesia dan Thailand	22
Gambar 2.1.	Perbandingan Pertumbuhan Ekspor Indonesia dan Thailand	22
Gambar 2.3.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Indonesia dan Thailand	23
Gambar 2.4.	Perbandingan Utang Luar Negeri Terhadap Pendapatan Nasional Brutto Indonesia dan Thailand	23
Gambar 3.1.	Perkembangan Kurs dan Tingkat Bunga The FED	26
Gambar 3.2.	Perkembangan Kurs dan Harga Minyak Dunia	27
Gambar 3.3.	Perkembangan Suku Bunga SBI dan Kurs	32
Gambar 3.4.	Perkembangan Suku Bunga SBI dan Inflasi	32
Gambar 3.5.	Share Pengeluaran Terhadap PDB ADHK 2000	34
Gambar 3.6.	Pertumbuhan Ekspor dan Impor (y-o-y)	35
Gambar 3.7.	Pertumbuhan Konsumsi dan PMTD (y-o-y)	36
Gambar 4.1.	Pertumbuhan Ekonomi Semu yang Tidak Diikuti Kesempatan Kerja	41
Gambar 4.2.	Perkembangan Indeks Produksi Pengolahan	44

Indonesia 2005: Perekonomian Di Tampuk Saudagar Dan Proyeksi Ekonomi 2006

Tim INDEF:

- M. Fadhil Hasan
- Didin S. Damanhuri
- Iman Sugema
- Bustanul Arifin
- Rina Oktaviani
- Aviliani
- Deniey Adi Purwanto
- Enny Sri Hartati

Desian Cover dan Tata Letak: Sarwo Edhie

INDEF,
Jakarta, Desember 2005

BAB I.

PENDAHULUAN

Setahun lalu pasangan SBY-JK terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam sebuah pemilihan umum langsung pertama—yang sangat demokratis—dengan suara mayoritas. Dukungan yang luas dari masyarakat baik dalam maupun luar negeri, ditambah dengan kondisi politik dalam negeri yang relatif stabil, seharusnya menjadi modal besar bagi tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu untuk meningkatkan stabilitas dan memacu pemulihan ekonomi nasional. Namun sayang modal besar tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, juga berbagai kesempatan hilang begitu saja karena kelemahan personal dan profesional serta lemahnya komitmen dan koordinasi.

Keraguan terhadap kemampuan tim ekonomi sebenarnya telah muncul sejak awal pembentukan kabinet pada Oktober tahun lalu. tim ekonomi yang terpilih dinilai lebih mencerminkan kepentingan kelompok bisnis “negatif” dan kepentingan internasional, dan sebaliknya tidak mencerminkan visi misi SBY-JK yang memiliki garis keberpihakan kepada kepentingan nasional. Kritik juga dilontarkan oleh berbagai kalangan, baik dari dalam maupun luar negeri, oleh karena prasyarat

kapabilitas, profesionalisme dan bersih dari KKN di antara sejumlah anggota tim ekonomi tidak terpenuhi.

Dalam setahun pemerintahan KIB perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan—sebagaimana tercermin dari berbagai indikator makro ekonomi dan kesejahteraan masyarakat—diakibatkan oleh pengelolaan kebijakan dan program ekonomi yang tidak tepat dan salah arah disertai ketidakpekaan para pengambil kebijakan terhadap karakteristik dan dinamika masyarakat Indonesia. Sebagai akibat dari itu maka kredibilitas para pengambil kebijakan di mata masyarakat semakin memudar yang pada gilirannya menambah ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi. Benar bahwa kemerosotan ekonomi dalam setahun terakhir ini juga diakibatkan oleh besarnya tekanan eksternal seperti melonjaknya harga minyak dunia, kenaikan tingkat suku bunga *the Fed*, bencana tsunami dan gempa bumi di NAD dan Nias, serta ledakan Bom Bali II. Namun langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah tidak mampu mengurangi dampak negatif, bahkan justru menambah persoalan yang dihadapi menjadi lebih kompleks. Selama setahun pemerintahan KIB ekonomi Indonesia ditandai dengan beberapa ciri sebagai berikut. Pertama, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan triwulanan. Kedua, merosotnya berbagai indikator makro ekonomi seperti inflasi dan suku bunga serta defisit perdagangan dan neraca pembayaran. Ketiga, meningkatnya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Bagaimana prospek ekonomi Indonesia di tahun 2006?. Ekonomi Indonesia di tahun 2006 masih akan mengalami persoalan dan tantangan besar baik dari sisi internal dan eksternal. Selain menghadapi persoalan tersebut di atas, tekanan eksternal berupa *downturn* ekonomi dunia, gejolak harga minyak dunia dan kecenderungan meningkatnya suku

bunga *the Fed* masih akan terus menghantui dan mempengaruhi prospek ekonomi Indonesia tahun mendatang.

Kajian ini berjudul *Perekonomian di Tampuk Saudagar: Instabilitas dan Insensitif* membahas bagaimana kinerja ekonomi Indonesia yang dalam setahun terakhir ini dikelola oleh para dan dengan cara-cara saudagar, yang menduduki berbagai jabatan dalam pemerintahan. *Saudagarisme—for better or worse*—sangat mewarnai pengelolaan dan proses pengambilan kebijakan ekonomi Indonesia dalam setahun terakhir ini. Fenomena *saudagarisme* merupakan thema yang akan dibahas dalam kajian ini. Sebenarnya munculnya *saudagarisme* dalam pengelolaan ekonomi bukan merupakan sebuah hal yang baru dan unik. Namun dalam perkembangan terkini, terutama di negara-negara Asia, fenomena *saudagarisme* sering dikaitkan dengan kemunculan Thaksin sebagai Perdana Menteri Thailand. Oleh karena itu, kajian ini dimulai dengan pembahasan tentang cara-cara Thaksin dalam mengelola ekonomi Thailand, yang dinilai berhasil membawa Thailand keluar dari krisis ekonomi yang dialami sejak tahun 1997 dalam waktu relatif cepat. Langkah dan kebijakan ekonomi Thaksin, yang terkadang tidak sejalan dengan paket dan resep IMF, dinilai sebagai keberhasilan saudagar yang memiliki cara-cara berbeda dalam mengelola ekonomi.

Keadaan yang mirip terjadi di Indonesia, dimana dalam setahun terakhir para saudagar—yang direpresentasikan oleh Wakil Presiden dan Menko Koordinator Perekonomian—sangat berperan dalam pengelolaan ekonomi Indonesia, setidaknya itu yang telah menjadi persepsi publik. Pertanyaannya adalah apakah *saudagarisme* ini telah berhasil membawa ekonomi Indonesia ke arah perkembangan yang lebih baik sebagaimana yang terjadi di Thailand?. Apakah persamaan dan perbedaan *saudagarisme*

Thailand dan Indonesia? Ini yang akan dibahas pada bagian pertama dari kajian ini.

Bagian kedua membahas perkembangan berbagai indikator makro ekonomi Indonesia—yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengalami kemerosotan akibat pengelolaan yang *ad hoc* dan salah arah serta lambat. Instabilitas makroekonomi—yang sebelumnya sempat terpelihara dengan baik—yang terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan tim ekonomi mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat terhadap gejolak eksternal, yang selanjutnya menyebabkan ekonomi sulit untuk pulih dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Sebagai konsekwensinya kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah semakin menurun dan pada saat yang sama berbagai ketidakpastian semakin terakumulasi. Dalam keadaan seperti ini para pelaku pasar dan juga masyarakat memiliki insentif untuk melakukan tindakan spekulatif, yang pada pada gilirannya mengakibatkan keadaan semakin tidak terkendali lagi.

Bagian ketiga dari kajian ini memberikan ilustrasi cara-cara pengelolaan berbagai kebijakan dan program ekonomi dalam setahun terakhir ini. Masalah tidak adanya koordinasi yang baik, implementasi yang lemah dan desain kebijakan yang tidak tepat sangat mewarnai kebijakan dan program ekonomi yang dilakukan sehingga terdapat *gap* dan *missing link* antara kebijakan—dengan asumsi itu kebijakan itu sendiri tepat—dengan hasil-hasil yang diharapkan. Selain itu juga banyak kebijakan dan program yang dijalankan hanya berdasarkan pertimbangan aspek teknis-ekonomis semata, dan mengabaikan aspek sosial-politik serta kelembagaan dan tidak sensitif terhadap dinamika dan karakter masyarakat sehingga menghasilkan kinerja yang rendah.

Bagian terakhir membahas berbagai tantangan dan proyeksi perekonomian tahun 2006. Dengan kinerja ekonomi tahun 2005 yang ditandai dengan berbagai kemerosotan dan instabilitas berbagai indikator makro ekonomi, perlambatan pertumbuhan, meningkatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan maka tantangan ekonomi tahun 2006 masih sangat besar dan berat, apalagi tekanan eksternal diperkirakan masih akan terus berlangsung. Karena itu, prospek ekonomi 2006 sangat ditentukan sampai sejauh mana tim ekonomi pemerintah memiliki kemampuan dan kredibilitas serta efektifitas dalam mengatasi permasalahan ekonomi terutama yang menyangkut perbaikan iklim investasi dan ekspor, pemeliharaan stabilitas makro ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Resuffle kabinet, terutama menyangkut tim ekonomi KIB yang dilakukan oleh Presiden SBY pada tanggal 5 Desember 2005 merupakan pengakuan lemah dan buruknya pengelolaan kebijakan ekonomi selama ini sehingga gagal membawa ekonomi ke arah stabilitas yang lebih baik dan pertumbuhan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, prinsip dan cara-cara *saudagar* telah dianggap gagal membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun, apakah dengan tim ekonomi baru—dibawah Dr. Budiono sebagai Menko Perekonomian dan Dr. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan—akan terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan kebijakan ekonomi kita. Jika ya, bagaimana. Banyak pihak yang memperkirakan bahwa pengelolaan kebijakan dan program ekonomi di bawah duet Boediono-Sri Mulyani akan sangat kental dengan pakem dan warna *Washington Consensus* sebagaimana pernah diterapkan oleh Boediono ketika menjadi Menteri Keuangan dalam kabinet Gotong Royong. Pertanyaannya adalah apakah pengelolaan kebijakan ekonomi seperti ini—yang pernah menjadi salah satu faktor yang menjadi sebab kekalahan Megawati Soekarnoputri—dapat mengatasi berbagai persoalan

ekonomi Indonesia yakni mengembalikan stabilitas makro ekonomi sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. ❶

BAB 2.

PEMBELAJARAN DARI THAKSINOMICS DAN "MODEL EKONOMI SAUDAGAR"

2.1. Pengusaha yang Jadi Penguasa : Thaksinomics

Thailand adalah satu diantara negara Asia Tenggara yang paling cepat keluar dari krisis. Pada saat krisis terjadi, kecuali Malaysia semua negara Asia yang terkena krisis mengikuti paket bantuan IMF, yakni melakukan pemulihan ekonomi dengan melakukan restrukturisasi utang dan penyehatan perusahaan serta perbankan baik swasta maupun BUMN (lewat privatisasi), penyehatan birokrasi pemerintahan (dengan menekan defisit anggaran dan pencabutan subsidi serta penegakan *good governance*) serta langkah-langkah lain yang kondusif terhadap proses liberalisasi perekonomian. Pada saat awal untuk keluar dari krisis, Thailand di pimpin oleh PM *Chuan Leekpai* yang sangat konsisten dengan paket-paket kebijakan IMF.

Meskipun *Chuan* yang dikenal sebagai PM yang paling bersahaja dan bersih, namun langkah-langkah kebijakannya yang pro-IMF tak mampu membawa Thailand keluar dari krisis. Kebijakan-kebijakan untuk menggerakkan sektor riil tak kunjung efektif, karena bank-bank tak

kunjung mengucurkan kredit kepada perusahaan-perusahaan. Hal ini karena dunia perbankan melihat belum jelasnya nasib kredit-kredit lama yang macet di perusahaan-perusahaan. *Thailand Asset Management Corporation* (TAMC)—seperti BPPN di Indonesia – yang telah menggelontorkan dana rekap terhadap perbankan tak berhasil mendorong bank-bank untuk mengucurkan kredit terhadap perusahaan-perusahaan. Dengan demikian Thailand terjebak kepada situasi pertumbuhan ekonomi rendah, karena sektor riil tak bergerak secara signifikan. Dalam situasi tersebut, bagi kalangan investor asing maupun nasional, tak menimbulkan minat investasi karena tak ada daya tarik bagi penciptaan keuntungan perusahaan.

PM Thaksin sebagai pengusaha yang terpilih menjadi penguasa – mulai menjabat sejak Februari 2001 – boleh dikata merupakan fenomena baru bagi rakyat Thailand yang telah terbiasa dipimpin oleh politisi baik berasal dari sipil maupun militer. Barangkali bisa ditafsirkan sebagai upaya keluar dari kejenuhan rakyat Thailand untuk menghirup udara baru dengan dipimpin oleh seorang pengusaha besar yang sukses agar mampu memulihkan dari krisis ekonomi. Sukses di dunia mikro perusahaan dapat menjadi modal untuk sukses dalam mengelola kenegaraan termasuk ekonomi makro.

Dan, ternyata dengan kebijakan ekonomi Thaksin akhirnya berhasil membawa Thailand keluar dari krisis ekonomi. Dengan sukses tersebut, dikenallah istilah *Thaksinomics* bukan hanya di jagat domestik namun juga di dunia internasional. Hal ini karena relatife otentik, dimana *Thaksinomics* berhasil, karena keluar dari resep generic IMF yang umumnya gagal memulihkan ekonomi di negara-negara berkembang. Selain itu, karena Thaksin tak mengumbar wacana yang vulgar anti-IMF. Namun lebih karena visi dan kebijakannya yang kongkrit – boleh dikata isinya bertolak

belakang dengan resep IMF -- yang akhirnya berhasil membawa Thailand keluar dari krisis dalam waktu relatif singkat dengan menempatkan kepentingan ekonomi nasional ketimbang menempuh liberalisasi perekonomian yang merugikan ekonomi rakyatnya.

Keberhasilan Thaksinomics yang relatif otentik tersebut, karena antara lain pertama, kebijakan fiskal dan moneter yang agresif untuk mengembangkan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) bersamaan dengan menciptakan situasi yang kondusif untuk menarik investasi skala besar baik berasal dari perusahaan multinasional maupun nasional. Dengan *dual track* tersebut, Thailand ingin mengakselerasi UKM baik sebagai perusahaan yang mandiri maupun terkait dengan sistem subkontrak dengan kegiatan usaha investor asing maupun nasional yang berorientasi ekspor. Upaya untuk akselerasi tersebut, Thaksin mengirim banyak UKM untuk belajar ke luar negeri. Akses kepada permodalan dari dunia perbankan pun dibuka selebar-lebarnya kepada UKM. Juga mendorong inovasi produksi dan manajemen UKM sehingga mereka semakin kompetitif.

Kedua, bersamaan dengan mendorong UKM di perkotaan maupun di pedesaan (untuk manufaktur non-agro maupun agroindustri) -- bahkan termasuk sektor informal -- secara massif, sekaligus mendorong pertumbuhan konsumsi, misalnya memberikan kredit perumahan dengan harga murah dan bersubsidi bagi masyarakat miskin di pedesaan. Dengan demikian, Thaksin berhasil menciptakan situasi yang kondusif bagi TAMC untuk merestrukturisasi perusahaan-perusahaan bukan dengan pengambilalihan utang macetnya -- seperti oleh BPPN di Indonesia -- tapi lebih karena naiknya asset-asset perusahaan-perusahaan yang bergerak kembali akibat permintaan yang tumbuh dari naiknya pendapatan dan konsumsi masyarakat sebagai keberhasilan mendorong

UKM, pertanian dan pedesaan. Akibat lebih jauh pada gilirannya perbankan dapat menekan kredit bermasalah (pinjaman tidak lancar, diragukan pengembaliannya dan macet) dari sebesar 68% menjadi 20% dan sedang diusahakan menjadi maksimal 3%. Dengan begitu Thailand akhirnya masuk ke jalur pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang pada gilirannya mampu memecahkan kemiskinan dan pengangguran.

Ketiga, memberikan ruang *maneuver* yang luas bagi kebijakan yang membangkitkan ekonomi rakyat – yang umumnya bertolak belakang dengan resep IMF yang menekankan kebijakan yang ketat baik fiskal, moneter maupun kredit – dengan cara mempercepat pembayaran utang kepada IMF. Setelah mencicil sebelumnya, kemudian pada bulan juli 2003, pemerintah Thaksin melunasi utang IMF sisanya sebesar 4,8 milyar US\$. Dengan tetap sebagai anggota IMF dan tidak mengembangkan wacana anti-IMF secara terbuka, namun peran IMF akhirnya dapat dibatasi hanya sebatas pemantau dan penasihat yang tak mengikat.

Keempat, reformasi BUMN dengan perbaikan manajemen untuk mendorong profitisasi dan kalau perlu swastanisasi untuk BUMN-BUMN yang kadung kropos, merugi dan tak ada potensi untuk bangkit kembali. Dalam reformasi ini termasuk untuk perbankan dengan memperkuat permodalan dan daya saingnya. Sementara untuk swasta ditekankan agar disamping memperbaiki manajemen juga dapat menanggulangi kredit bermasalah mereka sendiri tanpa membebankan kepada pemerintah. Langkah *merger* untuk bank-bank yang kurang daya saingnya juga ditempuh dalam rangka menyehatkan dunia perbankan.

Kelima, menyusul keberhasilan dalam pemulihan ekonomi nasionalnya, kemudian Thaksin mendorong Thailand dalam kerangka kerjasama perdagangan dengan negara-negara Asia sebagai langkah untuk

membawa Thailand berekspansi. Kemudian dilanjutkan dengan kerjasama perdagangan internasional secara lebih luas. Harap dicatat, bahwa untuk produk agroindustri, produk Thailand sebelum krisis pun telah merajai pasar dunia untuk teknologi menengah dan sederhana.

Maka dalam perspektif Thaksinomics, pemulihan ekonomi nasional dalam rangka keluar dari krisis ekonomi juga sekaligus dipakai sebagai peluang untuk memberdayakan UKM, pertanian dan pedesaan terlebih dahulu yang kemudian memicu pulihnya kembali perusahaan-perusahaan besar yang kolaps akibat krisis, dan juga mengkaitkan dengan kiprah MNC dengan pola subkontrak. Setelah semua itu berhasil, baru ia memperkuat kerjasama ekonomi Asia --seperti juga gagasan Mahatir – dan akhirnya Thailand masuk ke kancah perdagangan internasional secara lebih luas dengan daya saing nasional yang telah berhasil ia berdayakan sebelumnya.

2.2. Dilema Pengusaha yang Menjadi Penguasa

Bagaimana Indonesia dengan *SBYnomics*—jika istilah itu pun ada dan tepat-- plus ekonomi Sudagar yang berpusat di sekitar MJK ? Dengan melihat kebijakan yang ditempuh, rasanya kita masih belum menemukan otentitasnya (masih kental dengan resep IMF) terlebih lagi beberapa langkah yang diambil oleh para saudagar ini masih ditenggarai berada di luar rambu-rambu aturan main yang sehat. Meski belakangan terdapat upaya untuk mengoreksi dari Presiden dengan akan dikeluarkannya Kepres yang mengatur bagaimana agar tak terjadi konflik kepentingan dari penguasa yang berlatar belakang pengusaha.

Di Thailand sendiri, memang kritik terhadap Thaksin dan *Shin Corporation* juga tampak tak kalah serunya, dimana seorang aktivis

bernama Supinya Klangnarong dalam studinya menemukan bahwa kekayaan Thaksin dan perusahaannya dalam tahun 2004 saja naik sekitar 70%. Apakah ini berkat dari kedudukan Thaksin yang berkuasa sejak awal 2001 ?. Studinya belumlah usai, namun Thaksin justru telah mengadukan aktivis tersebut dengan tuduhan mencemarkan nama baik – hal yang mirip juga terjadi di Indonesia jika pejabat diadukan warganya karena tuduhan perbuatan korupsi. Kita tunggu saja hasil akhirnya, apakah proses peradilannya akan lebih baik daripada di Indonesia.

Hal yang sama terjadi juga di negara industri maju, yakni dilema pengusaha yang jadi penguasa ternyata bukan monopoli Indonesia. Terjadi antara lain di Italia, seorang industrialis besar bernama Silvio Berlusconi menjadi Perdana Menteri yang bukan saja menjadi beban Italia karena catatan rekam jejaknya yang ditenggarai melakukan *moral hazard* alias korupsi selama jadi pengusaha, juga menjadi perdebatan keras sewaktu Berlusconi mau menjadi Presiden tahunan Uni Eropah. Juga kontroversi Dick Cheney, Wapres AS yang berlatabelakang pengusaha yang ditenggarai kengototannya untuk meluluhlantakan Irak karena kepentingannya dalam pengusaha lading minyak di Irak.

Yang penting rupanya bukan meributkan pengusaha untuk menjadi penguasa – kalau memang yang bersangkutan terpilih oleh rakyat dalam pemilu yang bersih -- namun adakah aturan main yang mengatur secara efektif agar perilaku tak senonoh penguasa yang berlatar belakang pengusaha tak hadir dalam panggung penyelenggaraan pemerintahan yang pada gilirannya mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

2.3. Model Ekonomi Saudagar

Apa yang berlangsung di Indonesia selama setahun pemerintahan SBY ini adalah tercatatnya MJK (Muhammad Jusuf Kalla) menjadi Wapres dan Ical (Aburizal Bakri) menjadi Menko Perekonomian sebelum akhirnya diganti Boediono -- disamping beberapa anggota cabinet lainnya yang berlatarbelakang pengusaha seperti Menhub Hatta Radjasa, mantan Menko Kesra Alwi Sihab, Meneg BUMN Sugiharto, MenESDM Purnomo Yusgiantoro, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, Menpera Yusuf Anshari, Menperin Fahmi Idris, Menpar Jero Wacik, Menkominfo Sofyan Djalil, Menakertrans baru Erman Suparno, Menperen/Ket.Bappenas baru Faskah Suzeta-- pada pokoknya ada sekitar 30% dari jumlah 36 anggota kabinet.

Bahkan setelah merebaknya pemberitaan tentang menonjolnya pengusaha dalam kabinet tersebut, akhirnya melebar juga isu "DWI FUNGSI" (politisi/pejabat yang berbisnis) di kalangan legislatif -- terutama setelah mencuat isu percaloan di DPR yang melibatkan kolusi beberapa anggotanya dengan beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota serta DPRD -- bahwa ada sekitar 40% dari 550 anggota DPR yang berlatarbelakang pengusaha. Namun harus dicatat bahwa definisi pengusaha ini dalam arti luas termasuk mencakup bidang jasa seperti pengacara, konsultan, CEO dan pebisnis lainnya.

Dalam konteks ini, kita diingatkan jangan sampai terulang KKN skala mega jaman Orba -- meski peran teknokrat ekonomi sangat menonjol yang berkoalisi dengan militer waktu itu -- yang ditenggarai telah terjadi kebocoran keuangan negara antara 30 hingga 50%, dengan pemerintahan terpanjang sekitar lebih dari 3 dasawarsa.

Tentu dengan maraknya serta terdapat tokoh puncak Wapres yang berlatarbelakang pengusaha -- meski telah melepas jabatan dalam

perusahaannya -- telah memicu sentiment publik, berupa kecurigaan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) untuk kepentingan perusahaan yang pernah (atau masih) ia besarkan. Meski seperti telah ditulis dimuka bahwa di Thailand yang sukses dengan pemerintahan Thaksin dalam keluar dari krisis dan bahkan telah masuk kembali ke jalur pertumbuhan tinggi dan Italia bahkan AS yang pemimpin puncaknya berlatarbelakang Pengusaha namun publik domestik telah relatif menerima kehadirannya dan mampu mencegah kerugian publik bahkan memperoleh manfaat atas kelebihan-kelebihan yang dimilikinya.

Apa secara umum kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangannya jika penguasa yang berlatar belakang pengusaha ? Secara normatif dan teoritis, katakanlah ini merupakan model “ekonomi Saudagar” (karena menonjolnya pengendali ekonomi negara oleh “para saudagar”), kita mencatat setidak-tidaknya, antara lain :

Pertama, *entrepreneurship*, yakni sikap-sikap *risk taking*, *pioneer*, *innovative*, *creative* dan keberanian serta kecepatan dalam melihat peluang dengan pengambilan keputusan yang paling menguntungkan. Namun ketika jadi penguasa haruslah ia mampu menggeser sikap unggul ini dari *private entrepreneurship* menjadi *entrepreneurial government* dengan ukurannya yang utama adalah keuntungan publik sekaligus terjaga suasana *fairness* dunia usaha. Contoh yang baik yang dilakukan MJK di negeri ini seperti dalam kasus penyelesaian konflik Poso dan Ambon dengan Perjanjian Malino I dan II serta Perjanjian Damai Helsinki untuk kasus Aceh – betapapun masih terdapat kontroversi untuk yang disebut terakhir ini. Sedangkan untuk suasana *fair* dalam dunia usaha tampak publik merasa masih belum tercipta, bahkan terjadi konflik kepentingan.

Kenaikan fantastis keuntungan grup Bakrie sebesar Rp.1,91 triliun untuk kuartal III tahun 2005 dibanding Rp. 820 milyar tahun 2004 yang

berarti naik 133,4 % telah menyisakan pertanyaan publik tentang *fairness* dibalik keuntungan fantastis tersebut – sama seperti pertanyaan Supinya Klangnarong terhadap Thaksin yang keuntungan Shin Corp. naik 70% dalam tahun 2004 di Thailand. Tentu untuk menjawab soal keuntungan wajar tidaknya tersebut haruslah dilakukan evaluasi objektif oleh lembaga independen secepatnya dan hasilnya segera diumumkan ke publik agar tak menimbulkan kontroversi berkepanjangan disamping menunggu Keppres bahkan UU tentang aturan main yang *fair* dalam bisnis di mana pejabat/politisi masih ikut saham dalam perusahaan-perusahaan yang ikut tender dalam pelbagai proyek-proyek pembangunan.

Kedua, *pragmatism*, yakni melihat kegunaan semua sumber-sumber daya sepanjang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keuntungan sebesar-besarnya. Lagi-lagi dengan dengan penyesuaian, yakni kemampuan menggeser dari mengejar keuntungan perusahaan menjadi keuntungan publik. Dengan mengaca hal yang telah terbukti positif buat publik Thailand dari PM Thaksin adalah pragmatismenya untuk memanfaatkan IMF dalam bantuan awal dan pencitraan secara internasional – terutama di mata investor asing. Kemudian secara pragmatis setelah menyadari potensi dan peluang yang dimiliki Thailand dalam agroindustri dan agribisnis serta UKM, maka dengan cerdas bagaimana dalam mencapai pemulihan serta menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan justru prioritas pemerintahannya adalah dengan kebijakan fiskal, moneter dan kredit yang agresif kepada dunia pertanian dan UKM sebelum melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang kolaps.

Hal tersebut, bertentangan dengan resep IMF yang menekankan rekap terhadap perusahaan dan perbankan sebagai prioritas awal. Artinya pragmatisme Thaksin diambil dalam kerangka kebijakan yang

menguntungkan rakyat banyak Thailand dan tak tunduk kepada resep generik IMF. Lalu pragmatisme lain yang menarik yakni dengan tak manabuh genderang anti-IMF dalam wacana publik. Tapi lebih memilih sikap diam-diam agar tak dituduh anti IMF dan investor asing, seraya ia lunasi utang IMF dan setelah itu ia lebih leluasa mengimplementasikan visi pembangunan ekonomi yang menguntungkan rakyat Thailand sebesar-sebesarnya. Ini yang belum terjadi di Indonesia hingga empat pemerintahan pasca Orba, hingga pemerintahan SBY-MJK terakhir ini.

Ketiga, efisiensi dan *cost effectiveness* dalam proses pembangunan. Dalam konteks ini, langkah-langkah pemeberantasan KKN dengan memfungsikan KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian serta pembentukan Timtas Tipikor dari Presiden SBY dengan mengizinkan banyak pejabat tinggi yang diproses secara hukum dan bahkan telah divonis dari tindak pidana korupsi yan lumayan banyak (Gubernur Abdullah Puteh, Gubernur Joko Munandar, pimpinan DPRD Sumbar, mantan Menag Said Agil Almunawar dengan mantan Dirjen Hajinya, mantan Dirut Jamsostek dengan mantan Direktur Investasinya, Dirut beserta beberapa Direktur Bank Mandiri, Probosutejo, Dirut dan beberapa Direktur Bank BNI, dan banyak lagi baik yang berasal dari Pimpinan/Pejabat Pusat maupun Daerah).

Meski sering dikritik upaya pemberantasan korupsi tersebut masih bersifat “tebang pilih”, namun suasana efek jera dan risih berkorupsi sudah mulai agak tampak. Tentu saja ini masih jauh dari harapan publik dalam langkah komprehensif dan radikal untuk pemberantasan korupsi tersebut. Antara lain belum ada langkah “reformasi pemerintahan/birokrasi” yang serius dan sistematis, pengenaan hukuman mati seperti yang efektif dilaksanakan di China terhadap koruptor, gerakan efisiensi nasional misal dengan perlombaan antara Departemen-

Departemen dan Pemda-Pemda dalam indeks kebocoran yang paling rendah, dst. Namun dengan langkah yang relatif lebih serius dibandingkan sebelumnya, upaya pemberantasan korupsi adalah sebagai contoh menciptakan efisiensi dan penurunan biaya dalam proses pembangunan. Agaknya dalam langkah pemberantasan korupsi lebih menonjol inisiatifnya dari SBY ketimbang oleh MJK yang dicitrakan sebagai “Komandan Kebijakan Ekonomi Saudagar”.

Keempat, *output oriented*. Dengan sikap entrepreneurship, pragmatisme dan efisiensi serta *cost effectiveness* dalam implementasi proses pembangunan adalah diorientasikan untuk tercapainya *output* yang maksimal, yakni kesejahteraan dan keadilan sosial bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Ini masih amatlah jauh, bahkan untuk sekedar tercapainya pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi 8 tahun yang lalu. Memang Indonesia disamping satu-satunya negara yang belum pulih dari krisis ekonomi pasca krisis 1998, juga semasa pemerintah SBY-MJK, Indonesia tertimpa bencana amat dahsyat Tsunami di Aceh dan Sumut, berbagai penyakit polio, DBD, malaria, flu burung, dst. hingga guncangan luar biasa kenaikan minyak dunia hingga 70 \$ per barel. Hal ini semakin menyulitkan pemerintahan SBY-MJK maupun rezim pemerintahan siapapun.

Namun dengan *benchmarking* dari Thailand atau Malaysia, seharusnya pemerintahan pertama Presiden dan Wapres yang dipilih langsung oleh rakyat dengan kemenangan besar 62%, seharusnya dapat menciptakan pemerintahan yang kreatif, mandiri dan visioner dalam menjalankan kebijakan pembangunan ekonominya. Meskipun terdapat agenda yang diwariskan pemerintahan sebelumnya berupa *white paper* yang nota bene merupakan kelanjutan *Letter of Intent* (LoI) dari IMF, sepertinya tak pernah disentuh untuk dilakukan *adjustment* terhadap *felt*

need masyarakat Indonesia yang merasakan resep generik IMF hingga sekarang lebih banyak mudlaratnya. Antara lain pemotongan subsidi tanpa visi (misal kenaikan BBM lebih dari 100% yang terakhir), macetnya fungsi intermediasi perbankan sehingga sector riil tak bergerak, berbagai UU yang lebih menguntungkan investor asing (seperti UU migas, UU Sumberdaya Air, UU Perhutanan, UU Perikanan) yang tak kunjung direvisi, sikap *over-heroik* dalam sidang-sidang APEC dan AFTA yang selalu ingin dilihat paling depan dan radikal untuk mencabut pelbagai hambatan tarif maupun non-tarif termasuk subsidi di bidang pertanian dst. Padahal Negara maju saja (AS, UE dan Jepang) mati-matian untuk mensubsidi pertanian mereka.

Dengan uraian tersebut kiranya dapat disimpulkan, bahwa “ekonomi saudagar” (*saudagarnomics*) yang boleh diistilahkan berlaku Indonesia semasa pemerintahan SBY-MJK, jika kita bandingkan dengan Thaksinomics di Thailand terdapat perbedaan nuansa dan hasil yang berbeda bagi publiknya masing-masing. Memang Thaksinomics di Thailand di samping kebijakan ekonominya berpusat di satu tangan Perdana Menteri Thaksin. Juga Thaksin sebagai mantan Pengusaha sukses, meski juga terdapat kontroversi tentang pertumbuhan *Shin Corporation*, namun dia punya visi yang jelas dan kongkrit untuk memulihkan ekonomi serta memacu ke jalur pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan lebih banyak menguntungkan ekonomi rakyat Thailand ketimbang investor asing maupun sekelompok elit bisnis Thailand sendiri. Dan kalau perlu menempuh kebijakan yang bertentangan dengan resep generik IMF meski dilakukan dengan cerdas dan berorientasi kepada hasil ketimbang hingar bingar dalam wacana.

Sementara *saudagarnomics* di Indonesia terdapat beberapa catatan, antara lain : Pertama, komandan dari *saudagarnomics* lebih berpusat di

Wapres (notabene bukan puncak kekuasaan) yang karena lingkungan politik dan hukumnya belumlah menunjang (UU pengaturan bisnis yang terkait pejabat/politisi belumlah ada misalnya) disamping terdapat *lophole* (kekosongan hukum yang dimanfaatkan), dalam proyek-proyek dari kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-MJK masih “dicurigai publik” terdapat konflik kepentingan atas kiprah penguasa yang berlatarbelakang pengusaha.

Kedua, belum ada langkah kebijakan yang original yang dalam menghadapi berlakunya LoI yang kemudian diteruskan oleh *white paper* ala IMF hingga sekarang, kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-MJK belum mampu melakukan *adjustment* yang cerdas sehingga tanpa harus terkesan anti IMF/asing/barat mampu seperti Thaksin untuk memulihkan ekonomi nasional dari krisis, menggerakkan sector riil dan masuk ke jalur pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan karena ekonomi rakyat secara mayoritas lebih diuntungkan tanpa harus merugikan pelaku ekonomi menengah, besar maupun asing. *Content* kebijakan yang memberdayakan pertanian dan UKM serta industrialisasi yang berbasis sumberdaya unggul domestik seperti yang dilakukan Thaksin haruslah menjadi pilihan kebijakan. Tentu saja dalam proses ini pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan demokratisasi haruslah berjalan bersama-sama yang pada gilirannya output akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Ketiga, belum tercipta efektivitas pemerintahan karena lemahnya *leadership* dan visi dalam menegakan kebijakan ekonomi yang efisien, efektif dan berorientasi kepada kesejahteraan dan keadilan sosial seluruh rakyat. Dengan melihat Thaksin – meski cenderung dinilai agak otoriter - - namun soal efektivitas pemerintahannya yang memiliki *leadership* dan visi yang jelas dan kongkrit untuk rakyatnya serta outputnya berupa

kemajuan ekonomi sudah menjadi referensi yang diakui. Sebenarnya pemerintahan Soeharto di Indonesia antara 1970 s/d tengah 1980 relatif memiliki *leadership* dan visi yang cukup jelas dan kongkrit dengan *output* kebijakannya yang mencerminkan efektivitas pemerintahannya yang relatif dirasakan hasilnya oleh rakyat banyak.

Namun di atas semua kritik yang ada, peran “Ekonomi Saudagar” yang relatif telah mepergunakan prinsip *entrepreneurship*, *pragmatism*, *efficiency* dan *output oriented for public interest* justru baru menonjol dalam menciptakan lingkungan makro yang kondusif untuk pembangunan ekonomi, seperti meredakan konflik Poso dan Ambon (Perjanjian Malino I dan II), perjanjian damai di Aceh (Perjanjian Helsinki), relatif keseriusan dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum termasuk pemberantasan judi, narkoba, *illegal logging* dan *fishing*, penyelundupan. Oleh karena itu setahun pemerintahan SBY-MJK yang mereshuffle kabinet khususnya tim ekonomi, dalam maksud memperbaiki kinerja ekonomi dari “ekonomi saudagar” yang juga mampu mengeliminasi segi-segi negatifnya adalah hal yang mutlak dilakukan oleh pemerinatahan SBY-MJK agar mereka lebih dikenang sebagai negarawan ketimbang mantan militer dan pengusaha yang sukses sebelumnya.

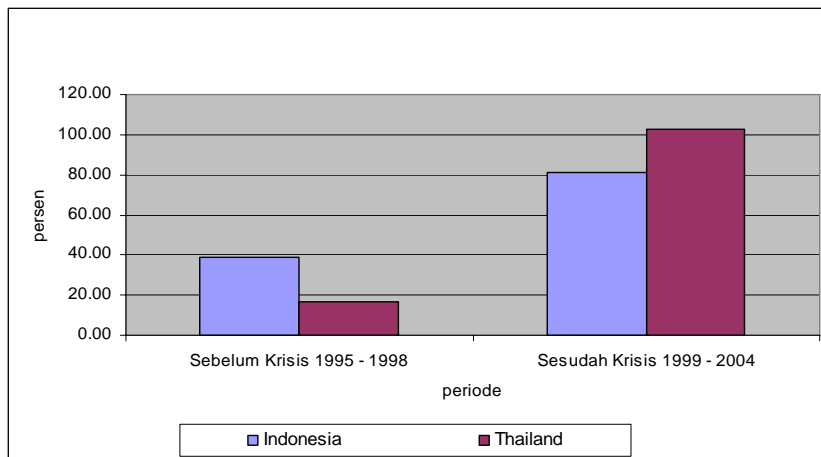
Di bawah ini, kita bisa melihat kinerja ekonomi makro Indonesia dibandingkan Thailand sebelum dan sesudah krisis (1995-1998) dan (1999-2004), seperti tergambar dalam table dan grafik batang di bawah ini.

Tabel 2.1.
Perbandingan Makroekonomi Indonesia
dan Thailand Periode Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi

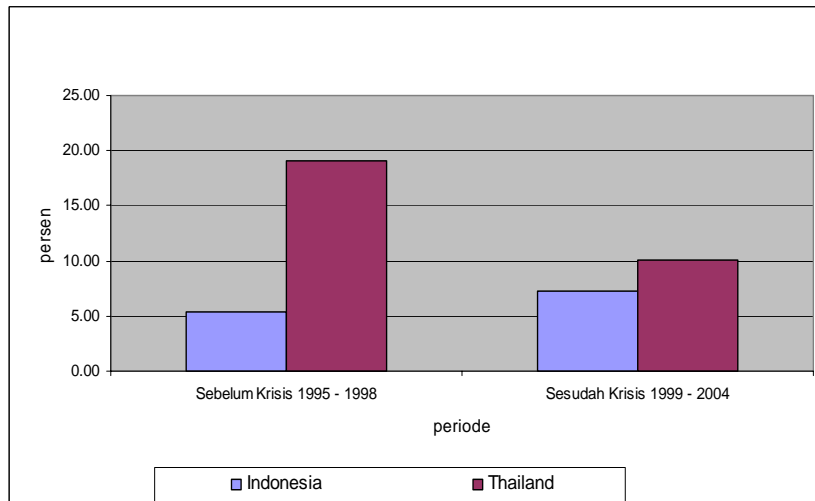
	Sebelum Krisis 1995-1998	Sesudah Krisis 1999-2004	Sebelum Krisis 1995-1998	Sesudah Krisis 1999-2004
	INDONESIA		THAILAND	
Jumlah penduduk (juta jiwa)	198.48	209.90	60.30	62.95
Tingkat Pengangguran, %	5.58	8.22	1.63	2.13
Pertumbuhan ekonomi (%)	1.90	3.99	0.81	4.94
Laju inflasi (%)	20.51	10.56	6.34	1.44
Suku bunga (%/tahun)	17.50	9.11	4.83	1.71
Suku bunga deposito 6 bulan (%)	19.21	14.50	9.06	2.15
Suku bunga deposito 12 bulan (%)	17.56	15.52	9.25	2.42
Pertumbuhan ekspor (%)	5.44	7.25	19.09	10.14
Nilai tukar (Rp/US\$)	4378.47	8894.15	30.75	41.17
External debt <i>as % of GNI</i>	88.65	92.95	73.97	58.24
Debt service ratio (%)	32.07	25.36	14.54	20.45

Sumber: Asian Development Bank, diolah

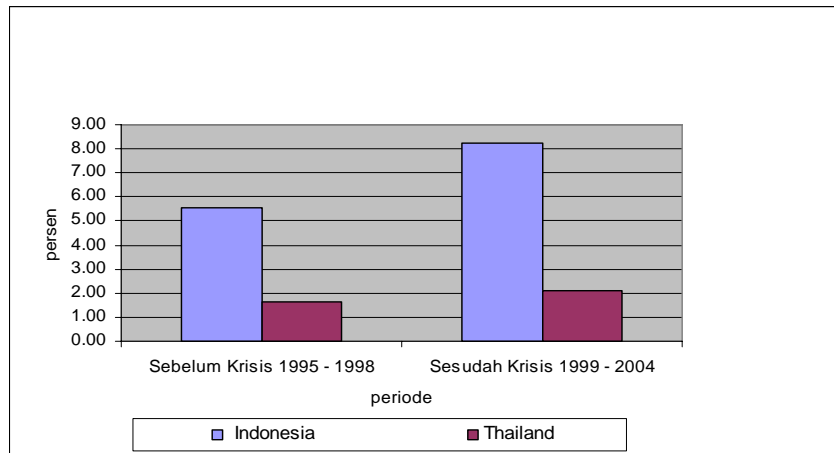
Grafik 2.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Thailand
(2000=100%)



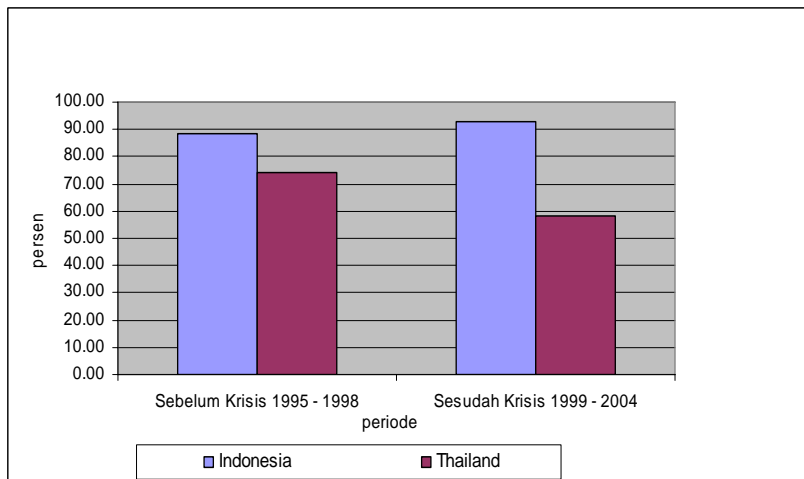
Grafik 2.2.
Perbandingan Pertumbuhan Ekspor Indonesia dan Thailand



Grafik 2.3.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Indonesia dan Thailand



Grafik 2.4.
Perbandingan Utang LN Terhadap Pendapatan nasional Bruto Indonesia dan Thailand



Dari Tabel dan grafik batang tersebut, terlihat baik sebelum maupun sesudah krisis, kinerja ekonomi makro Thailand lebih baik dibandingkan Indonesia. Hal yang sangat menonjol, bagaimana Thailand dengan efek *Thaksinomics* (setelah krisis, 2001-2004) dimana pertumbuhan ekonominya rata-rata sekitar 5%, pertumbuhan ekspor sudah di atas 10% dan dengan inflasi hanya 1,44% serta pengangguran hanya 2,13%. Yang lebih menarik lagi rasio utang terhadap PDB turun dibandingkan sebelum krisis dari 74% menjadi 58% sesudah krisis.

Sementara itu, untuk Indonesia pertumbuhan ekonomi rata-rata baru mencapai 4% dan pertumbuhan ekspor 7% dengan inflasi 10,6%, pengangguran 8,2%. Lebih jelek lagi rasio utang terhadap PDB mengalami kenaikan, dimana sebelum krisis 89% menjadi 93% setelah krisis. Dengan angka-angka tersebut, sebagai gambaran kasar, menunjukkan bahwa memang dapat dimengerti bila *Thaksinomics* menjadi referensi penting bagi Negara-negara berkembang lain, khususnya bagi Indonesia, yang mencerminkan otentisitas sebuah kebijakan ekonomi yang lebih berani keluar dari tekanan pihak lain – seringkali atas nama globalisasi -- dan menempatkan kepentingan rakyat dan bangsanya (seringkali bersifat *silent mass*) sebagai acuan untuk mengambil kebijakan yang dipertaruhkan ketimbang sekedar hingar bingar kaum elit domestic maupun internasional (semisal IMF).

Dengan demikian Tim Baru Ekonomi Kabinet SBY-MJK hendaknya berani untuk belajar dari keberhasilan *Thaksinomics* maupun lainnya (Malaysia sejak Mahatir misalnya) yang sangat otentik dan berorientasi kepada kepentingan nasional. ❷

BAB 3.

INSTABILITAS EKONOMI MAKRO

Bagian ini mengulas perkembangan ekonomi makro sebagai produk pengelolaan ekonomi ala para saudagar. Tekanan terhadap nilai tukar, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan instabilitas ekonomi makro. Instabilitas ekonomi makro ini diperparah dengan ketidakpastian dan inkonsistensi kebijakan pemerintah atas beberapa hal yang krusial menyebabkan ekspektasi negatif dunia usaha terhadap perkembangan ekonomi makro dan pada gilirannya memperburuk kinerja perekonomian secara keseluruhan.

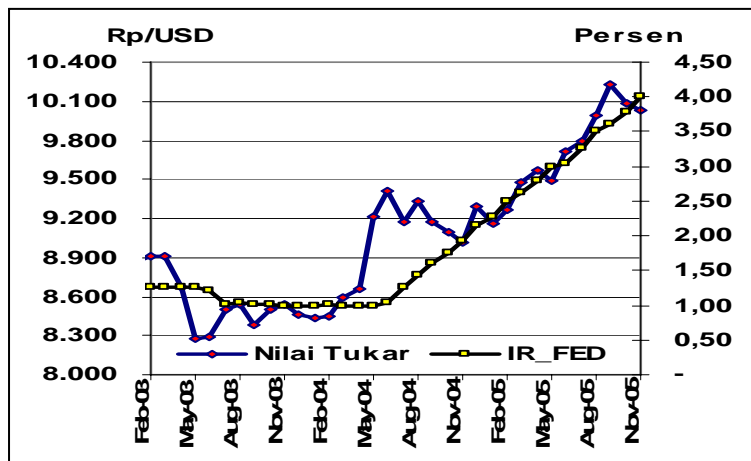
3.1. Nilai Tukar

Nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS mengalami depresiasi secara persisten sepanjang tahun 2005. Sejak Januari hingga Desember 2005, nilai tukar mengalami depresiasi sebesar 9,49%. Pada Januari 2005, nilai tukar Rupiah adalah sebesar Rp.8.441/ Dollar AS. Pada November 2005, nilai tukar sudah berada pada kisaran Rp.10.035/ Dollar AS.

Tekanan terhadap nilai tukar sepanjang tahun 2005 ini disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Di **sisi eksternal**, tekanan terhadap nilai tukar erat kaitannya dengan peningkatan suku bunga The Fed yang

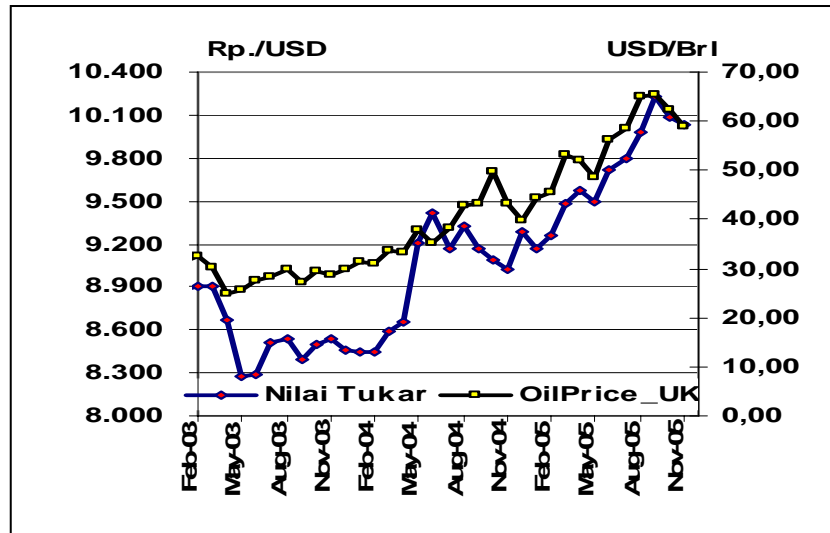
kemudian mendorong peningkatan tingkat bunga internasional. Peningkatan tingkat bunga Bank Sentral AS ini terkait dengan berlanjutnya kebijakan pengetatan moneter AS. Kemudian di sisi yang lain, tekanan terhadap nilai tukar juga terkait dengan kenaikan harga minyak dunia. Terbatasnya pasokan minyak dunia mendorong peningkatan harga minyak dunia. Namun mencermati perkembangan faktor eksternal seperti tingkat bunga The Fed kecenderungan peningkatannya terjadi paling tidak sejak pertengahan tahun 2004. Bahkan untuk harga minyak dunia, kecenderungan peningkatannya terjadi paling tidak sejak triwulan 2 tahun 2001. Dengan kata lain kecenderungan peningkatan kedua faktor ini bukan hal yang baru dan kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi hal ini dapat dilakukan jauh hari. Kebijakan pemerintah krusial dalam mengelola faktor-faktor internal.

Gambar 3.1.
Perkembangan Kurs dan Tingkat Bunga The FED



Sumber: IFS, diolah.

Gambar 3.2.
Perkembangan Kurs dan Harga Minyak Dunia



Sumber: IFS, diolah.

Di **sisi internal**, tekanan terhadap nilai tukar berasal dari besarnya permintaan valuta asing untuk impor dan pembayaran kembali utang luar negeri sementara pasokan valuta asing domestik masih terbatas. Terbatasnya pasokan valuta asing di dalam negeri terkait dengan rendahnya pertumbuhan ekspor dan investasi langsung (FDI). Hingga Triwulan III 2005 ekspor non migas tumbuh sebesar 2,40% sementara impor non migas tumbuh sebesar 34,83%. Kondisi ini menyebabkan defisit neraca transaksi perdagangan non migas meningkat. Hal ini mendorong terjadi defisit neraca pembayaran yang kemudian berdampak pada depresiasi nilai tukar. Selain itu, peningkatan permintaan valuta asing memicu pembelian valuta asing dari pengusaha domestik dan

individu baik untuk keperluan berjaga-jaga maupun spekulasi. Dampak ikutan yang disebut sebagai *bandwagon effect* diantaranya disebabkan oleh kondisi perbankan nasional yang mengalami over likuiditas.

Ke depan, tekanan eksternal dan internal masih cukup besar. Bank sentral AS diperkirakan akan meningkatkan tingkat suku bunganya sampai semester I-2006 hingga mencapai 4,5%. Sementara itu walaupun menunjukkan kecenderungan yang menurun, harga minyak dunia tahun 2006 diperkirakan masih akan mengalami gejolak yang cukup besar. Sementara itu berbagai faktor internal ditambah dengan kredibilitas kebijakan pemerintah akan sangat mempengaruhi perkembangan nilai tukar ke depan.

3.2. Inflasi

Sepanjang tahun 2005 juga terjadi lonjakan harga barang dan jasa yang cukup besar dan bahkan menjelang akhir tahun lonjakan yang terjadi sedemikian besarnya. Di awal tahun inflasi IHK sebesar 7,32% dan sempat menunjukkan penurunan di bulan Februari dan Maret. Inflasi bulan-bulan berikutnya hingga November menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Serangkaian kebijakan pemerintah terutama dalam hal kenaikan harga BBM dalam negeri memberikan tekanan yang cukup besar terhadap terjadinya inflasi. Pada bulan Februari 2005 pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk menaikkan harga BBM rata-rata sebesar 32,41%. Sementara itu di bulan Juli pemerintah menaikkan harga jual eceran (HJE) rokok sebesar 15%. Yang terjadi kemudian inflasi merangkak naik dari 7,40% di bulan Mei menjadi 8,33% di bulan Agustus. Belum lagi sepenuhnya ternetralisir (*leveling of*) inflasi yang terjadi, pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada bulan Oktober.

Kenaikan harga BBM pada bulan Oktober ini meliputi kenaikan harga minyak tanah sebesar 185,7%, solar sebesar 104,8% dan premium sebesar 87,5%.

Tekanan kenaikan harga BBM terhadap inflasi tampak dari kontribusi kelompok pengeluaran terhadap kenaikan harga. Inflasi (y-o-y) November yang sebesar 18,38% sebagian besar didorong oleh kenaikan harga pengeluaran transportasi dan komunikasi serta jasa keuangan. IHK pengeluaran transportasi dan komunikasi ditambah dengan pengeluaran pada sisi jasa keuangan ini mengalami kenaikan sebesar 44,76% dibandingkan IHK bulan yang sama tahun 2004. Kemudian kenaikan IHK bahan makanan sebesar 18,38% yang diikuti kenaikan IHK makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Dari sini jelas bahwa kenaikan harga BBM bisa jadi memiliki dampak langsung yang relatif tidak besar terhadap kenaikan harga. Namun dampak ikutannya terhadap pengeluaran transportasi, bahan makanan dan makanan jadi menyebabkan dampak akumulatif yang sangat besar terhadap kenaikan harga secara umum. Ditambah lagi dampak psikologis yang terjadi akibat ketidakpastian besaran dari kenaikan harga BBM yang telah diumumkan pemerintah jauh hari sebelumnya. Dampak akumulatif ini juga terdorong oleh siklus tahunan hari raya Idul Fitri.

Tabel 3.1.
Laju Inflasi IHK Bulanan dan Tahunan Tahun 2005

Kelompok Pengeluaran	IHK November 2004	IHK November 2005	Inflasi (m-t-m)	Inflasi (y-o-y)
U m u m	115,66	136,92	1,31	18,38
1. Bahan Makanan	108,53	128,27	2,47	18,19
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	114,65	130,72	2,06	14,02
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan bakar	123,09	141,00	0,64	14,55
4. Sandang	112,71	120,25	0,33	6,69
5. Kesehatan	112,24	119,29	0,59	6,28
6. Pendidikan, Rekreasi & Olah raga	126,15	136,63	0,29	8,31
7. Transpor dan Komunikasi & Jasa Keuangan	114,20	165,32	0,53	44,76

*) *Persentase perubahan IHK bulan November 2005 terhadap IHK bulan sebelumnya.*

**) *Persentase perubahan IHK bulan November 2005 terhadap IHK bulan November 2004.*

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS, diolah.

Selain kebijakan kenaikan harga BBM, inflasi yang terjadi juga disebabkan oleh tekanan dari depresiasi nilai tukar. Depresiasi nilai tukar yang terjadi persisten sejak awal tahun menyebabkan ekspektasi para pelaku usaha untuk meningkatkan harga barang dan jasa domestik. Oleh karena itu, inflasi dua digit di akhir tahun akan sulit untuk dihindari mengingat faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi nilai tukar masih akan menjadi satu masalah dan ditambah lagi dengan dorongan *cichycal* tahunan dari hari raya Natal dan Tahun Baru serta rencana kenaikan harga dasar listrik di tahun 2005.

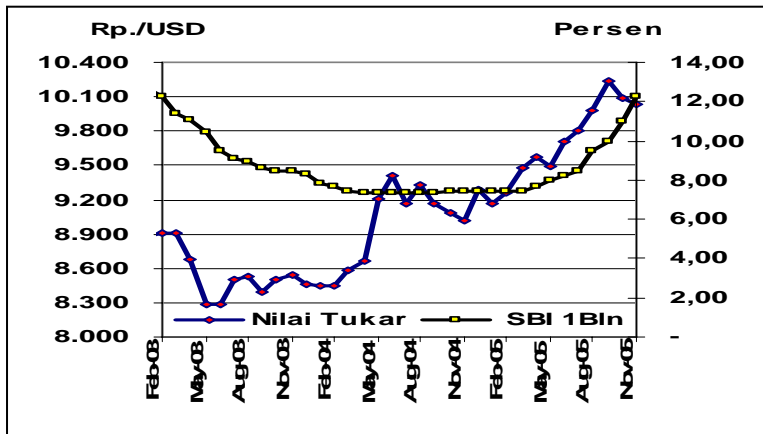
3.3. Suku Bunga

Suku bunga ditentukan oleh dua faktor yakni suku bunga internasional dan *expected inflation differential (EID)*. EID adalah perbedaan antara ekspektasi inflasi domestik dengan inflasi internasional. Bila kedua faktor ini meningkat maka suku bunga domestik niscaya harus naik. Pemahaman tentang hal ini akan membawa kita pada pra-kiraan yang lebih jernih.

Suku bunga internasional, saat ini sangat ditentukan oleh langkah-langkah yang di ambil oleh bank sentral Amerika Serikat (the Fed). Lebih dari setahun ini, dalam upaya mengendalikan inflasi, the Fed sangat rajin menaikkan suku bunga *the Fed Fund Rate (FFR)*. Alan Greenspan secara konsisten menyatakan bahwa kenaikan FFR masih akan dilakukan dalam jangka dekat ini. Dengan kenyataan ini, akan sangat sulit bagi BI untuk mempertahankan BI rate pada level yang sekarang. Kalau, ini dicoba maka nilai tukar rupiah kembali akan jebol.

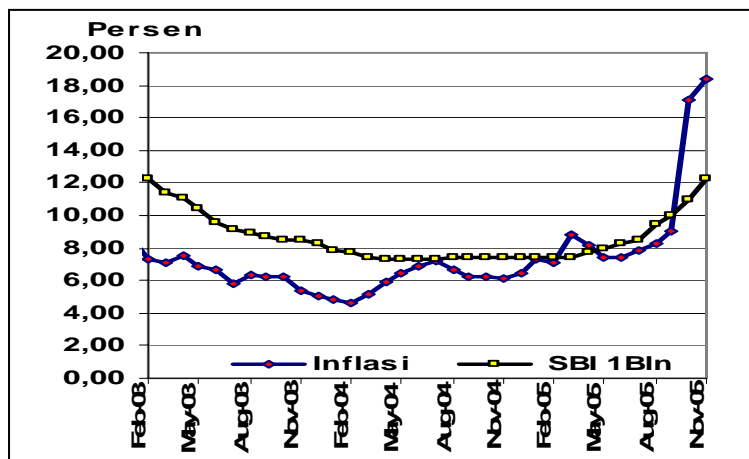
Karena suku bunga internasional sulit untuk dibentung, maka sangat penting untuk menjaga inflasi domestik tetap rendah. Aspek inilah yang tidak diperhitungkan sewaktu pemerintah menaikkan harga BBM. Pemerintah justru menciptakan inflasi, dan bukannya mencegahnya.

Gambar 3.3.
Perkembangan Suku Bunga SBI dan Kurs



Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah.

Gambar 3.4.
Perkembangan Suku Bunga SBI dan Inflasi



Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah.

3.4. Pertumbuhan : ekspor, investasi dan konsumsi

Depresiasi nilai tukar, kenaikan inflasi dan tingginya suku bunga akan memberikan tekanan yang cukup berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan III pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 2,87% dibandingkan triwulan II 2005 dan 5,34% dibandingkan triwulan III 2004. Di satu sisi tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menembus angka 5%. Angka batas dimana pertumbuhan ekonomi paling tidak dapat memberikan multiplier yang cukup dalam menggerakkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja. Namun di sisi yang pertumbuhan ekonomi pada 2005 ini niscaya akan memberikan multiplier yang cukup karena pertumbuhan yang terjadi sebagian besar masih didorong oleh pengeluaran konsumsi. Hingga triwulan III 2005, pertumbuhan konsumsi swasta (y-o-y) adalah sebesar 4,43% sedangkan konsumsi pemerintah sebesar 16,15%. Sementara itu pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya 9,18%.

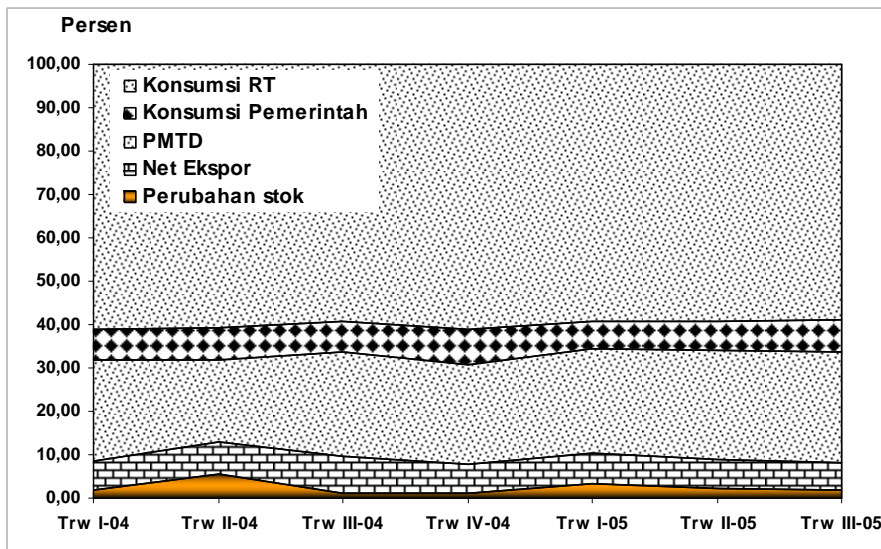
Tabel 3.2.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran

Pengeluaran	Triw II-05 Thd Triw I-05	Triw III-05 Thd Triw II-05	Triw III-05 Thd Triw III-04	Triw I-III -05 Thd Triw I-III-04
1. Konsumsi Swasta	1,36	1,79	4,43	3,75
2. Konsumsi Pemerintah	7,54	20,47	16,15	0,62
3. PMTB	3,65	1,55	9,18	12,38
4. Perubahan Stok	-37,52	-5,88	65,07	-5,89
5. Ekspor	4,68	1,89	3,39	9,50
6. Impor (-/-)	6,14	2,35	9,29	14,06
PDB	1,36	2,87	5,34	5,76

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS, diolah.

Bahkan dengan mencermati perkembangan struktur PDB berdasarkan pengeluaran dapat dilihat bahwa sejak beberapa tahun terakhir share konsumsi terhadap PDB sangatlah besar (Gambar 3.5). Hingga triwulan III 2005, share pengeluaran konsumsi terhadap PDB adalah sebesar 66,39% dengan kecenderungan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap pengeluaran konsumsi sangatlah besar. Padahal pertumbuhan dengan basis konsumsi menyimpan sejumlah masalah mulai dari rendahnya *multiplier effect* hingga membesarnya impor.

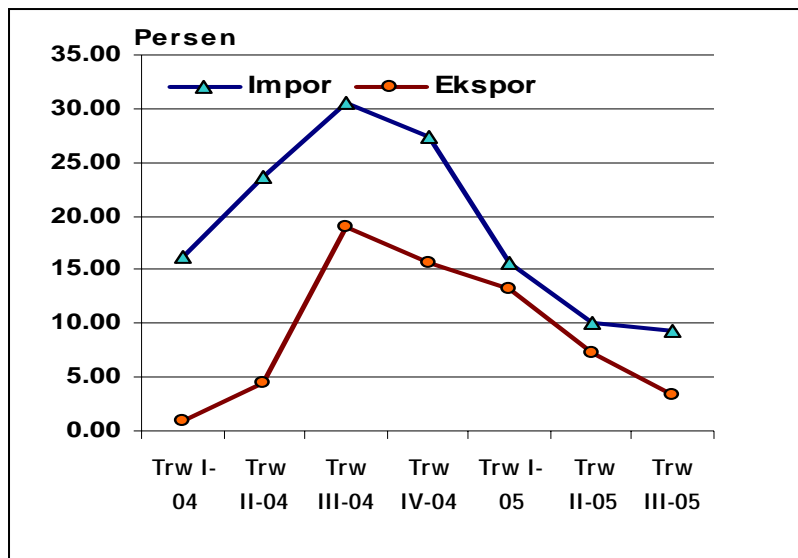
Gambar 3.5.
Share Pengeluaran Terhadap PDB ADHK 2000 (Persen)



Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS, diolah.

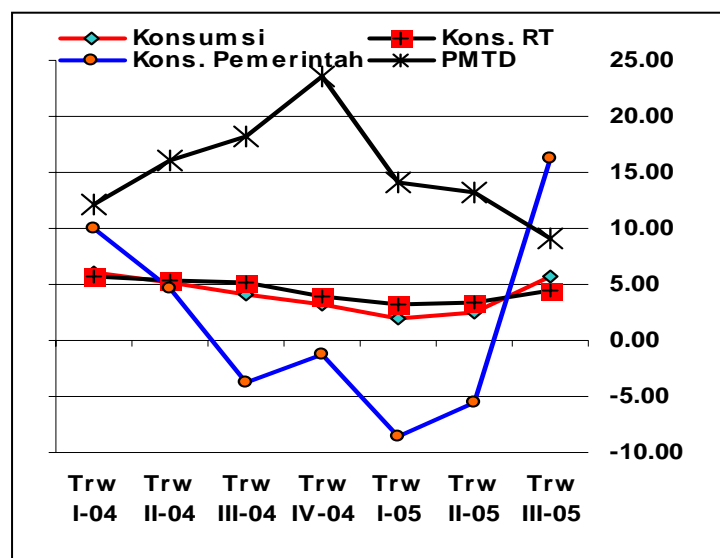
Hal ini mulai tampak dari kontribusi pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada gambar 3.6. tampak bahwa pertumbuhan impor Indonesia lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor. Kondisi semacam ini walaupun akan kembali pada besarnya namun dalam jangka panjang akan mendorong terjadi defisit neraca pembayaran. Pada gambar 3.7. juga tampak bahwa pertumbuhan sejak awal tahun 2005 pengeluaran konsumsi cenderung meningkat dan PMTB terus menurun. Dengan dasar PDB Konstan, pertumbuhan dibawah sudah menghilangkan dampak inflasi terhadap PDB. Dapat dibayangkan kemudian apabila pertumbuhan dimaksud diikuti dengan inflasi.

Gambar. 3.6.
Pertumbuhan Ekspor dan Impor (y-o-y)



Sumber: SEKI BI dan BPS, diolah.

Gambar 3.7.
Pertumbuhan Konsumsi dan PMTD (y-o-y)



Sumber: SEKI BI dan BPS, diolah.

Rendahnya PMTB berarti pula rendahnya investasi. Rendahnya investasi akan menyebabkan ekspansi produksi dan penciptaan lapangan kerja baru di dalam negeri mengalami perlambatan atau bahkan stagnan. Sebagai akibatnya jumlah pengangguran akan bertambah. Sementara itu, rendahnya ekspansi produksi dalam negeri tidak dapat mengimbangi permintaan masyarakat. Pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan impor yang lebih besar sementara nilai tukar rupiah terus terdepresiasi. Daya beli masyarakat akan menurun dan masyarakat miskin akan bertambah. Pemerintahan kabinet Indonesia bersatu menargetkan penurunan angka tingkat pengangguran dari 9,70% di tahun 2004 menjadi 5,10% pada tahun 2009. Selain itu juga pemerintah

mentargetkan penurunan angka kemiskinan dari 16,60% di tahun 2004 menjadi 8,20% di tahun 2009. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sepanjang 2005, rasanya sulit untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan dan pengangguran jika tidak mau dikatakan bagai pungguk merindukan bulan. Yang jelas sasaran pembangunan nasional sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009 untuk memantapkan stabilitas makro ekonomi serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas belum sedikitpun menunjukkan keberhasilannya. ③

BAB 4.

KEGAGALAN KEBIJAKAN EKONOMI

Dalam bagian ini akan dibahas betapa pola pengelolaan ekonomi oleh para saudagar tidak hanya menciptakan instabilitas makro tetapi juga telah memperburuk keadaan di lapisan ekonomi terbawah. Kita akan mengangkat tiga kasus yang memuat fakta bahwa tim ekonomi tidak hanya gagal mengelola dan menangani permasalahan ekonomi, tetapi juga kebijakan yang ditempuhnya bersifat tidak peka (*insensitive*), tidak masuk akal (*insensible*), dan keterlaluhan (*insanity*). Ketiga kasus tersebut adalah pengangguran, kemiskinan dan impor beras.

Masalah pengangguran adalah contoh ketidakpekaan tim ekonomi karena pengangguran terus meningkat dan sementara itu tidak ada kebijakan yang jelas untuk menangani masalah ini. Peningkatan kemiskinan hendak dicoba diatasi dengan kebijakan yang sama sekali tidak masuk akal yaitu BLT. Impor beras adalah keputusan yang mencerminkan sebuah *insanity*, dimana di tengah-tengah upaya pemberantasan korupsi masih ada yang berani menjadi pemburu rente.

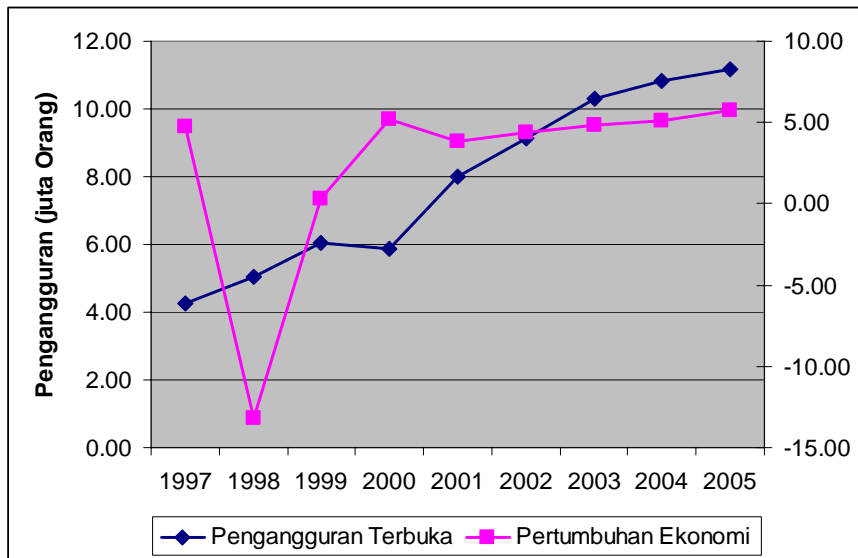
4.1. Pengangguran dan Disindustrialisasi

Sepanjang pemerintahan SBY-JK, masalah pengangguran bisa dikatakan merupakan sektor yang hampir tidak tersentuh oleh kebijakan ekonominya. Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama tiga triwulan tahun 2005, justru menyebabkan angka pengangguran semakin meningkat. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dan tidak mampu menciptakan lapangan pekerja. Padahal secara teoritis, kenaikan pertumbuhan sebesar 1% akan menyerap 500 ribu pengangguran.

Sejak Februari 2005 angka pengangguran terbuka sudah meningkat menjadi 10,3% dan jumlah penduduk yang bekerja tidak penuh sebesar 29,6 juta orang (31,2 %) atau lebih dari sepertiga dari penduduk yang bekerja. Sementara jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 60,6 juta orang atau 63,9% dari penduduk yang bekerja. Artinya kesempatan kerja yang mampu disediakan oleh perekonomian hanya sebesar 9,9% untuk total pekerja. Kondisi terpuruknya lapangan kerja ini masih terus berlanjut. Pada Oktober 2005, dari jumlah angkatan kerja sebesar 106,9 juta orang, hanya 95,3 juta orang yang terserap di lapangan kerja. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Oktober 2005 meningkat lagi menjadi 10,84%.

Semakin membengkaknya angka pengangguran tersebut tentunya disebabkan kemandegan pada pertumbuhan sektor riil. Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebabnya antara lain, *pertama* kebijakan ekonomi pemerintah SBY – JK masih bersifat *ad hoc*. Kebijakan ekonomi tidak menyentuh akar permasalahan, yaitu hanya terfokus pada stabilitas variabel-variabel makro, seperti indikator moneter dan defisit anggaran. Tidak ada satupun kebijakan yang langsung mampu memberikan insentif bagi pertumbuhan sektor riil. Kebijakan paket insentif perpajakan yang ditawarkan sebagai obat penawar kenaikan BBM hanya bersifat semu, karena tidak mampu mengurangi beban kenaikan biaya produksi.

Gambar 4.1.
Pertumbuhan Ekonomi Semu
yang tidak diikuti Kesempatan Kerja



Kedua, pasca kenaikan BBM, belum ada realisasi komitmen pemerintah dalam penghapusan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Pengusaha masih mengalami hambatan ekspor, prosedur perizinan, retribusi hingga pungutan liar yang menyebabkan biaya produksi tinggi dan terjadinya inefisiensi. Janji pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang transparan, sistem teknologi online pada perijinan, pelayanan satu atap, perda yang konsisten, dan menurunkan pajak tak kunjung terealisasi. Para pelaku dunia usaha setiap saat masih dihadapkan pada banyaknya pungutan liar dan tingginya biaya transaksi yang diakibatkan tingginya biaya distribusi barang untuk sampai ke tangan konsumen.

Ketiga, lambatnya penyerapan tenaga kerja selama tahun 2005 disebabkan keterlambatan ekspansi fiskal pemerintah. Keterlambatan pengucuran anggaran departemen yang disebabkan pemimpin proyek tidak siap dengan sistem anggaran baru (DIPA). Akibatnya, sampai akhir triwulan III 2005, anggaran proyek masih tersisa Rp 121 triliun. Konsekuensi dari keterlambatan ini tentunya menunda fungsi stimulan kebijakan fiskal dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Banyak proyek yang seharusnya berjalan, menjadi terhambat dan menyebabkan perputaran ekonomi menjadi mandeg.

Keempat, belum optimalnya fungsi intermediasi perbankan. Kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit terkait dengan banyaknya faktor resiko dan menjaga *prudential banking*. Apalagi ditengah tingkat suku bunga yang tinggi, perbankan lebih aman menaruh dananya pada obligasi pemerintah. Akibatnya, pembiayaan terhadap sektor riil sangat ketat.

Kelima, rendahnya daya beli masyarakat. Keterbatasan pendapatan masyarakat menyebabkan penurunan konsumsi dan beralihnya konsumsi pada barang-barang substitusi impor dari cina yang harganya lebih murah. Penurunan permintaan terhadap produksi domestik ini pada akhirnya akan membuat banyak perusahaan gulung tikar dan meningkatnya PHK.

Keenam, kenaikan harga BBM ternyata cukup signifikan menyebabkan terjadinya sejumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terutama di sektor industri padat karya (seperti industri tekstil, alas kaki, makanan, dll.) dan usaha-usaha kecil yang menggunakan BBM sebagai penunjang kegiatan utamanya (nelayan dll). Menurut perhitungan BPS, kenaikan BBM awal Maret 2005 dan awal Oktober 2005, telah menciptakan tambahan pengangguran baru sebesar 426 ribu. (Tabel 4.1).

Tabel 4.1.
Perkiraan Angkatan Kerja
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Rincian	2004	2005		
	Agustus 2004	Februari 2005	Oktober 2005 *)	Oktober 2005 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkatan Kerja (000)	103 973,4	105 802,4	106 888,3	106 888,3
Bekerja (000)	93 722,0	94 948,1	95 730,8	95 304,3
Penganggur (000)	10 251,4	10 854,3	11 157,5	11 584,0
TPT (%)	9,86	10,26	10,44	10,84

Sumber : *Berita Resmi Statistik No. 57 / VIII / 1 Nopember 2005, BPS*

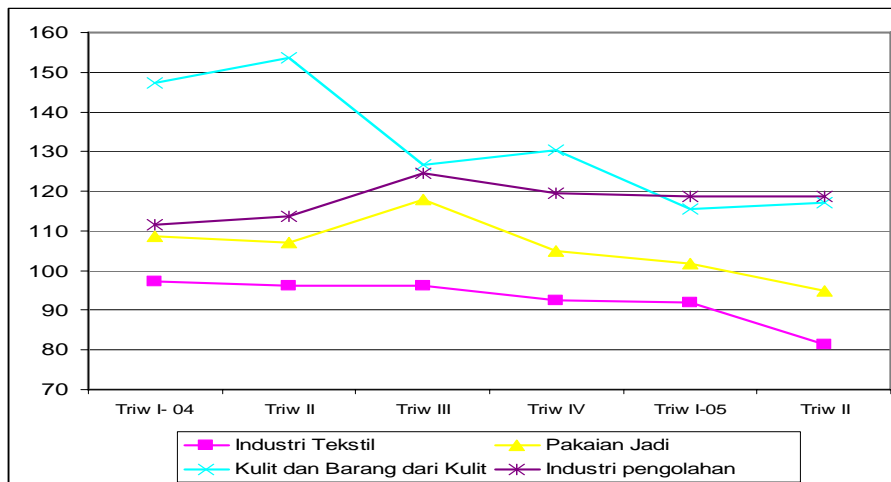
Catatan:

*) : Tanpa memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM (Angka Sementara).

**): Dengan memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM (Angka Sementara).

Ketujuh, peningkatan nilai impor impor barang-barang konsumsi selama Januari – Oktober 2005, cukup besar yaitu sebesar 20,97 persen. Sementara *share* dari impor barang modal hanya sebesar 14,22 persen dari total impor. Porsi impor terbesar adalah bahan baku dan penolong yaitu 78,05 persen. Namun bisa jadi bahan baku dan penolong ini setelah masuk pasar Indonesia menjadi *final demand*. Artinya menjadi barang yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Indikasi ini terbukti tidak ada hubungan yang cukup signifikan antara peningkatan impor bahan baku yang cukup tinggi, yaitu sebesar 29,19 persen dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan di Indonesia. Terbukti indeks produksi industri pengolahan justru mengalami kemerosotan atau deindustrialisasi. Beberapa industri padat karya, selama tiga triwulan terakhir yang mengalami kemerosotan terparah. Seperti dalam gambar 4.2., indeks produksi industri tekstil, sepatu, pakaian jadi terus menurun drastis.

Gambar 4.2.
Perkembangan Indeks Produksi Industri Pengolahan,
Triwulan I 2004-Triwulan II 2005



Kedelapan, pesimisme terhadap ketersediaan lapangan kerja akibat memburuknya kondisi ekonomi tercermin dari hasil survei konsumen Bank Indonesia pada September 2005. Indeks keyakinan konsumen menurun 9,6 poin dari 99,7 menjadi 90,1. Angka indeks di bawah 100 menunjukkan kondisi pesimistis. Pesimisme konsumen, akibat kenaikan harga BBM dan pelemahan kurs akan memperburuk penyediaan lapangan kerja. Dengan meningkatnya ekspektasi inflasi dan suku bunga kedepan menyebabkan pengusaha akan berhati-hati dalam melakukan ekspansi usahanya.

4.2. Kemiskinan dan BLT

Penurunan jumlah orang miskin masih menjadi agenda nasional pemerintah Indonesia dalam setiap program pembangunannya. Dampak krisis ekonomi tahun 1997 belum sepenuhnya teratasi oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu lebih dari 36 juta jiwa pada tahun 2004 (Tabel 4.2). Daerah desa yang lebih banyak penduduknya paling tinggi jumlah penduduk miskinnya. Tanda-tanda bahwa kemiskinan itu jelas ada di Indonesia juga mulai terkuak dengan munculnya kasus-kasus seperti busung lapar, kurang gizi (marasmus) dan meningkatnya angka putus sekolah pada pertengahan tahun 2005. Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mendekati garis kemiskinan berpotensi besar dan sangat rentan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran.

Namun pada kenyataannya kebijakan yang diambil bukan bertujuan utama untuk mengurangi angka kemiskinan, namun mengamankan APBN. Menurunkan angka kemiskinan seringkali hanya dijadikan jargon untuk melegalkan kebijakan pencabutan subsidi, seperti yang terjadi dengan penghapusan subsidi BBM. Program perubahan bentuk subsidi pada komoditi (BBM) menjadi subsidi langsung tunai menjadi alasan pemerintahan SBY melegalkan peningkatan harga BBM.

Kebijakan Pencabutan subsidi BBM dan mengalihkan kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan kepada 15,5 juta rumah tangga (kurang lebih 30% dari total rumah tangga Indonesia), saat ini telah banyak dikritisi dan mengalami serangkaian permasalahan seperti yang telah diperkirakan sebelumnya. Akibatnya, sudah dapat dipastikan ratusan ribu keluarga miskin yang berhak menerima BLT ini tidak akan memperolehnya.

Table 4.2.
Garis Kemiskinan, Persentase dan Jumlah Penduduk di Bawah
Garis Kemiskinan di Indonesia Tahun 1976-2004

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/ bulan)		Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan (juta)		
	Kota	Desa	Kota	Desa	Desa +	Kot	Desa	Desa +
1976	4522	2849	38.8	40.4	40.1	10.0	44.2	54.2
1977	4969	2981	30.8	33.4	33.3	8.3	38.9	47.2
1980	6831	4449	29.0	28.4	28.6	9.5	32.8	42.3
1981	9777	5877	28.1	26.5	26.9	9.3	31.3	40.6
1984	13731	7746	23.1	21.2	21.6	9.3	25.7	35.0
1987	17381	10294	20.1	16.1	17.4	9.7	20.3	30.0
1990	20614	13295	16.8	14.3	15.1	9.4	17.8	27.2
1993	27905	18244	13.5	13.8	13.7	8.7	17.2	25.9
1996	38246	27413	9.7	12.3	11.3	7.2	15.3	22.5
1997	42032	31366	13.6	19.9	17.7	9.6	24.9	34.5
1998 ¹⁾	96959	72780	21.9	25.7	24.2	17.6	31.9	49.5
1999 ²⁾	92409	74727	19.5	26.1	23.5	15.7	32.7	48.4
2000 ³⁾	91632	73648	14.6	22.1	19.0	12.1	25.2	37.3
2001 ⁴⁾	100011	80382	9.8	24.8	18.4	8.6	29.3	37.9
2002 ⁵⁾	130499	96512	14.5	21.1	18.2	13.3	25.1	38.4
2003 ⁶⁾	138803	105888	13.6	20.2	17.4	12.2	25.1	37.3
2004 ⁶⁾	143455	108725	12.1	20.1	16.7	11.4	24.8	36.1

Sumber: BPS, 2003

Catatan: ¹⁾Berdasarkan Susenas Desember 1998

²⁾ Berdasarkan Susenas Reguler February 1999

³⁾ Berdasarkan Core Susenas 2000 -Core termasuk NAD and Maluku

⁴⁾ Berdasarkan Core Susenas 2001 termasuk NAD

⁵⁾ Berdasarkan Core Susenas February 2002 termasuk Including Pendugaan 4 Propinsi (NAD, Maluku, Maluku Utara dan Papua) dimana tidak termasuk sample Modul Consumsi Susenas 2002.

⁶⁾ Berdasarkan Susenas Reguler

Belum tuntas program ini berjalan, kita telah banyak menyaksikan dan membaca di berbagai media masa munculnya kekacauan pelaksanaan program ini. Permasalahan-permasalahan muncul dimulai dari ketidaktepatan data keluarga miskin, ketidaktepatan sasaran, keterlambatan pembagian kartu, kecemburuan antara masyarakat miskin, dan konflik antara aparat dengan masyarakat dan berbagai ekses negatif lainnya.

Hasil penelitian Smeru, 2005 yang mengadakan survei di wilayah DKI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi catatan selama implementasi BLT, yaitu meliputi: implementasi kelembagaan, sosialisasi, implementasi pengumpulan data, penentuan target, dan distribusi dana BLT.

Tidak adanya petunjuk implementasi yang jelas dan menyeluruh mengenai kelembagaan (organisasi) yang mengurus BLT. Petunjuk yang ada hanyalah parsial, misalnya pengumpulan data rumahtangga miskin dan distribusi kartu kompensasi BBM (KKB) yang pendistribusiannya terbatas dan cenderung menjadi kepentingan internal lembaga-lembaga yang mengurus hal ini. Akibatnya, tidak ada pemahaman yang sama antar lembaga (BPS, Departemen Sosial dan PT Pos Indonesia). Misalnya, Depsos hanya mengurus program dan tidak mengurus implementasi di lapang, BPS hanya mengurus pengumpulan data, penentuan target dan distribusi KKB, dan PT Pos hanya mengurus pendistribusian dana subsidi. Ketiga lembaga tersebut berjalan dengan tugasnya masing-masing dengan koordinasi yang tidak baik. Pemerintah daerah juga tidak dilibatkan dalam program ini. Padahal pemerintah daerah yang akan terkena dampak jika terjadi gangguan sosial akibat program.

Terbatasnya waktu melakukan sosialisasi program memicu permasalahan yang akan muncul. Sosialisasi baik kepada lembaga-

lembaga yang bertanggungjawab terhadap program BLT hingga di level lapang, hingga kepada seluruh masyarakat akan siapa saja yang menjadi target dan berhak menerima BLT mengakibatkan kesalahpahaman dan kesalahan penyaluran dana BLT. Akibatnya, kecemburuan sosial menjadi dampak muncul sebagai dampak negatif dari program ini.

Kesalahan penentuan target seringkali dijumpai pada penyaluran dana BLT. Kesalahan ini terjadi karena adanya perbedaan penanganan verifikasi dan penilaian oleh petugas yang berbeda. Petugas yang melakukan verifikasi berbeda dengan yang melakukan penilaian. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran verifikasi yang dilakukan petugas di lapang. Selain itu, pada implementasinya, tidak semua petugas melakukan pendistribusian KKB dari rumah ke rumah. Akibatnya, meski nama-nama calon penerima KKB telah terdata, namun tidak menerima kartu KKB.

Penentuan target menjadi penting dalam penentuan siapa-siapa saja yang akan menerima dana BLT. Penyimpangan yang dilakukan petugas pendata target penerima BLT kepada yang tidak berhak mengakibatkan kegagalan keberhasilan program BLT. Kesalahan lain disebabkan adanya perbedaan ketentuan siapa yang berhak sebagai penerima BLT oleh Depsos dengan data keluarga miskin di BPS. Depsos mensyaratkan bahwa keluarga miskin yang tinggal tempat yang ilegal seperti di kolong jembatan, dan tidak memiliki lahan, tidak berhak memperoleh KKB. Data BPS yang dijadikan dasar penentuan jumlah orang miskin yang menjadi target tidak membedakan hal tersebut. Akibatnya, terdapat kelebihan target yang diajukan BPS dan pada implementasinya terdapat orang miskin yang butuh bantuan tidak menerima dana tersebut.

Meski pendistribusian dana BLT relatif sukses diberbagai daerah, namun implementasinya tidak luput dari berbagai permasalahan. Adanya pemotongan dana oleh oknum aparat pemerintahan masih dijumpai.

Perencanaan, persiapan dan rancangan serta pelaksanaan dari program yang dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kompleksitas implementasi di lapangan akan memberikan kegagalan terhadap suatu program. Belum lagi ketidakjelasan sistem monitoring dan evaluasi. Suatu program yang baik hendaknya mengintegrasikan sistem monitoring dan evaluasi ke dalam organisasi dan desain sistem operasi.

Terlepas dari masih banyaknya permasalahan dalam penyaluran dana kompensasi BBM, kebijakan ini membawa dampak yang luas bagi keseluruhan masyarakat Indonesia. Dampak peningkatan harga BBM yang dihadapi dan dirasakan masyarakat adalah peningkatan harga-harga barang atau inflasi.

Hasil penelitian Oktaviani, 2005 menunjukkan pula bahwa transfer langsung pemerintah kepada rakyat miskin bersamaan dengan penurunan subsidi BBM bukan merupakan kebijakan yang efisien. Hanya dengan peningkatan harga BBM sebesar 29 persen saja telah mengakibatkan peningkatan inflasi sebesar 6.7 persen. Sementara itu upah riil tidak mengalami perubahan dengan adanya transfer dana langsung kepada rakyat miskin. Peningkatan konsumsi masyarakat hanya 0.7 persen walaupun terdapat transfer langsung dari pemerintah ke rumahtangga. Apalagi dengan peningkatan harga BBM yang lebih dari 100%, tentu saja tingkat inflasi menjadi lebih tinggi lagi dan daya beli masyarakat menjadi semakin menurun. Namun jika peningkatan BBM tersebut disertai dengan peningkatan penawaran tenaga kerja terampil karena pemerintah meningkatkan subsidi ke sektor pendidikan, maka dampaknya akan lebih baik. Upah ril akan meningkat sebesar 1.5 persen meskipun terjadi inflasi hampir 30 persen dan konsumsi rumahtangga akan meningkat sekitar 7 persen.

Table 4.4.
Dampak Penurunan Subsidi BBM dan Transfer Langsung
Kepada Rakyat Miskin (Perubahan Persentase)

Variabel Makroekonomi	Simulasi 1	Simulasi 2
Neraca Perdagangan	-2.7	-13.5
Deflator PDB	4	16.6
Harga Modal	7.2	40
Harga Tenaga Kerja	6.7	31.2
Indeks Harga Konsumen	6.7	29.6
Upah Riil	0	1.5
PDB Riil	4.1	18.3
Konsumsi Rumah Tangga	0.7	6.8
Ekspor	5.6	24.6
Impor	8.5	41.7

Catatan:

1. Penurunan 29% subsidi BBM (peningkatan pajak BBM) dan peningkatan 15% transfer langsung pemerintah ke rakyat miskin (rural 1, 2, 5 dan urban 1)
2. Penurunan 29% subsidi BBM (peningkatan pajak BBM), peningkatan 2.73% supply tenagakerja administratif, dan peningkatan 12.83% supply tenagakerja manager/profesional

Sumber: Oktaviani, 2005

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan program pemberian dana BLT perlu dikaji ulang efektivitasnya. Peningkatan harga BBM karena dihilangkannya subsidi pemerintah merupakan pukulan yang telak bagi masyarakat. Apalagi dengan peningkatan anggaran pemerintah yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat seperti; anggaran kepresidenan, anggaran wakil presiden dan gaji anggota DPR. Hal ini menunjukkan ketidaksensitifan pemerintah terhadap nasib rakyat.

4.3. Kasus Impor Beras: Kontroversi yang Tidak Produktif

Kasus kontroversi impor beras dapat dianggap sebagai salah satu contoh debat publik yang paling tidak produktif, karena belakangan bergulir menjadi isu *low politics* yang telah bergeser agak jauh dari persoalan yang sebenarnya. Kontroversi berawal dari hasil rapat koordinasi terbatas Kabinet Indonesia Bersatu tanggal 22 dan 25 Oktober 2005 yang memberi izi impor kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebesar 70,050 ribu ton. Izin impor itu dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan bernomor 05/M-DAG/11/2005 tanggal 1 November 2005. Izin impor beras itu dianggap telah mengabaikan instrumen kebijakan sebelumnya yang melarang impor beras sampai akhir tahun 2005, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 9/MPP/Kep/1/2004 tentang pengaturan impor beras, yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dan telah diperpanjang atau direvisi sebanyak dua kali.

Kontroversi tersebut dianggap tidak produktif karena setelah melalui beberapa kali rapat kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi IV dan Komisi VI, keputusan akhir tentang impor beras itu terkesan mengambang, walaupun secara tersamar disebutkan bahwa para wakil rakyat tidak setuju tambahan impor beras. Belakangan, kontroversi itu benar-benar telah masuk ke ranah politik, terutama setelah sekitar 115 orang anggota DPR setuju untuk mengusulkan hak angket untuk bertanya kepada pemerintah. Masyarakat akhirnya bertanya-tanya, akankah solusi bermuatan politik demikian tinggi tersebut dapat membantu memperbaiki kinerja ekonomi perberasan atau meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia? Rasanya sulit.

Ekonomi perberasan di Indonesia nampaknya telah ditakdirkan sulit sekali untuk melepaskan diri dari muatan politis yang begitu kental. Tidak jarang masyarakat pun sering menetapkan kriteria “swasembada” sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan pangan, tanpa pernah berusaha menggali lebih dalam tentang prinsip-prinsip ketahanan pangan, yang jauh lebih komprehensif dari pada sekadar aspek penyediaan bahan pangan (pokok) secara makro. Selain memiliki dimensi penyediaan pangan, konsep ketahanan pangan juga mencakup “aksesibilitas masyarakat terhadap pangan” dan “stabilitas harga pangan” yang juga peduli terhadap permasalahan rawan pangan, tingkat kecukupan gizi, fluktuasi harga pangan yang menimbulkan kerawanan sosial dan sebagainya. Fenomena busung lapar (tepatnya: gizi buruk dan gizi kurang) yang membawa korban manusia dan melanda beberapa daerah di Indonesia, serta kasus kelaparan yang merenggut puluhan jiwa di daerah terpencil Yahukimo di Tanah Papua adalah salah satu bukti tidak tepatnya para elit politik dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pangan.

Dalam kosa-kata ekonomi kelembagaan, persoalan kisruh beras dan ketidak-teraturan pembangunan ekonomi secara umum di Indonesia adalah *low-level equilibrium trap* (jebakan keseimbangan tingkat rendah). Pembangunan pertanian di negara miskin seperti Indonesia umumnya memiliki biaya transaksi ekonomi yang sangat tinggi, tingkat risiko yang juga tinggi, arus dan perputaran informasi yang rendah – karena hanya berputar di kalangan para elit – dan lingkungan kelembagaan yang juga lemah. Perumusan kebijakan sangat sering tidak melalui proses analisis teknis-obyektif dengan metodologi yang dapat dipertanggung-jawabkan, tetapi melalui suatu proses tawar-menawar (baca: tekan-menekan) dengan kepentingan ekonomi dan politik kental dan tidak lagi terselubung. Kebijakan sering dikeluarkan tanpa proses analisis *ex-ante* yang memadai, termasuk konsekuensi yang akan terjadi, siapa yang diuntungkan dan

siapa yang dirugikan. Kemudian ketika timbul masalah, baru dicari justifikasi dan pembenaran yang diperlukan. Tembak dulu, sasaran ditentukan kemudian. Langkah kebijakan seperti ini tentu saja sangat primitif, dan hanya pantas diberlakukan pada kondisi sistem ekonomi politik yang tidak beradab, fasis-feodalistik, dan yang pasti bukan di tengah masyarakat Indonesia yang sedang mencoba bangkit dari krisis.

Masyarakat mengira dengan jatuhnya Orde Baru dan kekuasaan Presiden Soeharto, pola aransemn kelembagaan dan proses perumusan kebijakan semakin beradab, karena gembar-gembor tingkat transparansi kebijakan, demokratisasi dan governance system akan segera diikuti dan diterjemahkan menjadi langkah aksi dan implementasi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat banyak. ernyata masyarakat harus menerima kenyataan pahit ini: keempat presiden pasca Soeharto tidak mampu mewujudkan prinsip-prinsip keberadaban kebijakan, jika tidak dapat dikatakan seakan melangkah mundur jauh ke belakang pada era penjajahan. Tingkah laku para elit dan politisi tidak henti-henti memikirkan dirinya sendiri, tunjangan gaji yang ribuan kali lebih besar dibanding penghasilan rakyat. Sesekali mereka juga memikirkan melakukan "money politics" dengan menyuap langsung masyarakat miskin sebagai pertanda pengakuan dosa atas kebijakan ekonomi menyengsarakan rakyat yang telah diambilnya.

Beberapa sebab dan akibat kontroversi kebijakan impor beras berkepanjangan tersebut akan diuraikan di sini.

(1) Diskrepansi Data Produksi dan Konsumsi.

Penyebab paling mendasar dari kisruh impor beras adalah diskrepansi data produksi dan data konsumsi beras. Diskrepansi tersebut menjadi lebih dahsyat ketika masing-masing instansi pemerintah tidak saling percaya terhadap data yang dimilikinya, tanpa pernah berfikir

bahwa hal tersebut dapat menurunkan kredibilitas kebijakan secara umum. Angka resmi ramalan produksi beras oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 November 2005 adalah 53,985 juta ton gabah atau setara 34 juta ton beras dengan faktor konversi 0,63. BPS melakukan pemutakhiran (updating) angka produksi ini empat kali dalam setahun, sebelum menyatakannya sebagai angka produksi tetap. Faktor konversi 0,63 ini telah digunakan sejak puluhan tahun terakhir, tanpa pernah mengakui kemajuan teknologi penggilingan padi dan kemampuan petani memperbaiki teknologi pasca panen.

Asumsi bahwa para penyuluh lapang dan mantri statistik di kecamatan seluruh Indonesia masih mampu melaksanakan tugasnya, tingkat akurasi data produksi BPS masih boleh dibanggakan. Selama empat tahun terakhir, angka ramalan ketiga (aram 3) BPS nyaris mendekati kebenaran dan hanya meleset sekitar 1 persen (antara negatif 0,72 dan positif 0,47 persen). Akan tetapi, ketika petugas lapangan di atas tidak bekerja baik, suplai data dari lapangan tersendat, serta metode estimasi ubinan (perkiraan produksi untuk areal 2,5 x 2,5 meter sebelum dikonversi menjadi produksi per hektar) tidak pernah dikalibrasi di lapangan, maka kita semua berbicara sampah. Ingat, ketika kita semua risau dengan impor beras mencapai 3 juta ton tahun 2002 dan 2 juta ton tahun 2003 karena hal tersebut menekan harga gabah tingkat petani – kita langsung terdiam dan takjub ketika pemerintah meng-klaim menghasilkan produksi beras 33,8 juta ton dan telah mencapai swasembada beras pada tahun 2004, tanpa pernah peduli terhadap overestimasi angka produksi beras selama ini. (Lihat Maksun dan Suwandhi (2004), serta artikel Suwandhi di KOMPAS, 12 November 2004).

Tabel 4.5.
Kinerja Produktivitas dan Impor Beras, 1990-2005

Tahun	Luas Panen (000 ha)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi Gabah (000 ton)	Produksi Beras ^{a)} (000 ton)	Impor Beras ^{b)} (000 ton)
1990	10.502	4,30	45.179	29.366	29
1991	10.282	4,35	44.689	29.048	178
1992	11.103	4,34	48.240	31.356	634
1993	11.013	4,38	48.181	31.318	0
1994	10.734	4,35	46.641	30.317	876
1995	11.439	4,35	49.744	32.334	3.014
1996	11.569	4,41	51.101	33.215	1.090
1997	11.141	4,43	49.377	32.095	406
1998	11.613	4,17	48.472	30.537	5.765
1999	11.963	4,25	50.866	31.118	4.183
2000	11.793	4,40	51.898	32.345	1.513
2001	11.415	4,39	50.181	31.283	1.400
2002	11.521	4,47	51.490	32.369	3.100
2003	11.488	4,54	52.138	32.846	2.400
2004	11.922	4,54	54.088	34.075	2.000
2005 ^{c)}	11.801	4,57	53.985	34.010	250

Catatan: a) Faktor konversi 0.65 sebelum 1998 dan 0.63 setelah 1998

b) Data beras impor berasal dari beberapa sumber, termasuk beras selundupan

c) Angka ramalan III BPS (per November 2005)

Sumber: Badan Pusat Statistik (berbagai tahun)

Angka konsumsi beras diperoleh dari angka konsumsi langsung rumah tangga 113.6 kg per kapita yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2004. Angka tersebut kemudian ditambah dengan konsumsi beras oleh industri makanan 21 persen, dan lain-lain, lalu dikalikan jumlah penduduk sekitar 220 juta jiwa, maka

keluarlah angka sekitar 32 juta ton konsumsi beras. Variabel estimasi jumlah penduduk dan konsumsi beras oleh industri jelas sangat sensitif dalam angka total estimasi tingkat konsumsi beras untuk seluruh Indonesia. Sekadar informasi, BPS hanya melakukan survai konsumsi beras oleh industri menengah dan besar, tapi hanya melakukan estimasi konsumsi beras oleh industri kecil dan menengah. Akibatnya, angka konsumsi ini “cukup rawan” dan sangat sensitif terhadap faktor koreksi tingkat konsumsi beras industri non-rumah tangga tersebut.

Diskrepansi data produksi dan konsumsi beras tersebut di atas sebenarnya adalah masalah akademik biasa, namun akan membawa implikasi atau konsekuensi ekonomi politik yang tidak ringan bagi Presiden SBY. Jika pemerintah SBY maju terus dengan impor, maka secara tidak langsung pemerintah mengakui ketidakberhasilannya mencapai swasembada beras, suatu posisi politik yang sama sekali tidak menguntungkan. Akan tetapi, sikap atau rasa ketidakpercayaan Pemerintah SBY terhadap data produksi-konsumsi publikasi BPS dapat juga ditafsirkan bahwa swasembada yang pernah dicapai Presiden Megawati pada tahun 2004 tersebut hambar adanya. Bahkan, tidak mustahil ketegasan posisi Presiden SBY dalam hal estimasi neraca bahan pangan domestik ini, dapat juga ditafsirkan sebagai pengakuan dari gejala atau fenomena overestimasi produksi beras, yang selama ini hanya mejadi diskusi akademik tertutup dan bahan perbincangan non-formal lainnya.

(2) Ketidakjelasan Fungsi Stok Penyangga

Sampai saat ini, konsep dan fungsi stok penyangga pangan masih tidak terlalu jelas dan sulit dipahami masyarakat luas. Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan memang

menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu menyediakan stok pemerintah, khususnya untuk pangan tertentu yang bersifat pokok – atau tepatnya, beras. Argumen tentang impor beras untuk memenuhi dan menjaga stok domestik menjadi rancu dan terkesan sangat dipaksakan. Apabila keputusan impor awal 70 ribu ton ini akan digunakan untuk memperkuat cadangan pangan domestik dan pemenuhan beras bersubsidi untuk keluarga miskin, hal itu pun menandakan ketidakhandalan aparat pemerintah dalam membuat perencanaan dan perhitungan yang diperlukan. Sebagaimana diketahui, sejak awal 2003, lembaga pemerintah Badan Urusan Logistik telah berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lebih dikenal dengan Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Walaupun demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola cadangan stok beras dalam negeri, terutama untuk kepentingan logistik strategis dan kebutuhan sosial mendesak.

Dalam konteks ini, pemerintah menugaskan Perum Bulog, melaksanakan fungsi buffer stocking dan melakukan pengadaan gabah dalam negeri karena konon Bulog dianggap paling berpengalaman dan memiliki jaringan distribusi paling lengkap di negeri ini. Setiap tahun, Bulog mampu mengelola sekitar 2 juta – 2,2 juta setara beras, ditambah pengelolaan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang berkisar 4 juta ton termasuk yang disalurkan. Laporan Bulog kepada Komisi IV DPR-RI per tanggal 14 September 2005 menyebutkan bahwa stok beras yang dikelolanya mencapai 1,64 juta ton setara beras yang tersebar di seluruh Indonesia atau cukup untuk 8,88 bulan penyaluran rutin. Kemudian, secara tiba-tiba jumlah stok beras Bulog menurun drastis dan berada di bawah 1 juta ton, konon karena penyaluran beras untuk keluarga miskin dilaksanakan secara serentak untuk periode tiga bulan. Suatu keputusan kebijakan yang sama sekali tanpa perencanaan yang

matang. Oleh karena itu, keputusan kebijakan impor beras benar-benar patut dipertanyakan, apalagi hanya dengan pertimbangan argumen minimnya stok beras di pasar (bukan stok penyanggah) di dalam negeri. Sekali lagi, ancaman kelangkaan beras dalam negeri sulit diterima karena perkiraan produksi beras cukup baik dan perhitungan stok penyanggah dan stok pemerintah telah dilakukan secara obyektif tanpa kepentingan terselubung tertentu.

Konsekuensi paling menyakitkan dari impor beras "mendadak" sekarang ini adalah kemungkinan dampak buruk kejatuhan harga gabah yang harus ditanggung oleh petani. Pasar beras domestik adalah salah satu contoh dari struktur pasar asimetris dan tidak setara, karena pelaku yang memiliki posisi tawar lebih baik menekan pelaku di bawahnya. Pedagang besar menekan pedagang pengumpul, lalu pengumpul menekan tengkulak dan tengkulak pasti menekan petani karena faktor hubungan psikologis yang telah terjalin sebelumnya. Walaupun angka impor beras 70 ribu ton bukanlah jumlah spektakuler yang mampu menggoyang pasar domestik, namun struktur yang asimetris inilah yang sangat berperan. Beras impor belum masuk dan baru saja menjadi berita, maka para tengkulak telah menekan harga pembelian gabah petani. Telah cukup banyak studi yang menyebutkan bahwa faktor psikologis menjadi faktor yang cukup dominan dalam pasar beras domestik, sehingga kabar tentang rencana impor beras ini telah menurunkan harga beras di beberapa sentra produksi.

Hal yang menarik adalah bahwa ketika para elit politik telah mulai "terdesak" atas keputusannya memberikan ijin impor beras tersebut, mereka kemudian beramai-ramai membuat pernyataan bahwa beras impor yang terlanjur masuk ke Indonesia "dijamin" tidak akan bocor ke pasar domestik. Suatu pernyataan kamufase, yang sekaligus

juga menunjukkan ketidakpahaman mereka atas dinamika dan aktivitas ekonomi masyarakat yang sebenarnya jauh lebih kompleks dibandingkan hasil analisis akademik di atas meja. Para elit politik ini sebenarnya diharapkan mampu membuat situasi lebih sejuk dengan pernyataan yang disampaikan. Masyarakat berhak memberikan penilaian bahwa telah terjadi "kekacauan kebijakan" dalam impor beras. Dalam hal ini, pembangunan institusi yang merupakan tanggung jawab pemerintah tidak akan cukup hanya dilakukan dengan pernyataan politik, tapi harus dilakukan secara lebih sistematis dan terencana secara baik dan jika perlu melibatkan swasta dan masyarakat madani.

(3) Rente Ekonomi Impor Beras Sangat Besar.

Dalam setiap transaksi ekonomi beras diduga melibatkan perburuan rente ekonomi yang sangat tinggi. Rente ekonomi impor beras ini sangat menggiurkan bagi mereka di sekitar pusat-pusat kekuasaan untuk mencari justifikasi apapun tentang impor beras. Kebutuhan stok penyanggah, antisipasi melonjaknya harga beras karena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tingginya laju inflasi dan lain-lain adalah sedikit dari sekian macam argumen, yang sebenarnya juga terkesan dipaksakan. Rente ekonomi yang diperoleh importir beras adalah hasil kali margin atau potensi keuntungan di atas dengan volume impor beras. Semakin banyak impor yang digunakan, maka semakin besarlah rente ekonomi yang dapat diraup. Walaupun harga dunia beras saat ini berada pada titik keseimbangan tertinggi dalam tiga dasar warsa terakhir, tapi harga US\$ 266 per ton atau setara Rp 2.700 per kilogram masih lebih rendah dibandingkan harga domestik yang berada di atas Rp 3.000 per kilogram. Nilai rente ekonomi yang dapat diperoleh akan jauh lebih besar apabila mereka mampu mencari beras di pasaran dunia dengan harga

yang lebih rendah dari harga rata-rata dunia saat ini. Konon, harga stok lama beras di Vietnam dan Thailand dapat di-dumping dengan harga sekitar US\$ 230 per ton atau tidak sampai Rp 2.600 setelah ditambah asuransi dan ongkos angkut.

Beras masih merupakan komoditas sensitif secara ekonomi dan politik walaupun volume beras yang diperdagangkan di tingkat dunia telah makin besar atau sekitar 23 juta ton, karena AS dan Uni Eropa telah mulai masuk ke dalam pasar beras dunia. Peta perdagangan dunia menjadi lebih pelik ketika pasar dunia tidak bisa lagi dianggap sebagai pasar yang steril dari praktik-praktik bisnis tidak sehat. Apabila impor beras yang dilakukan pada akhir tahun 2005 ini hanyalah memanfaatkan produk sisa di Thailand dan Vietnam, yang pasti berkualitas lebih rendah dan berharga lebih murah dari harga dunia US\$ 266, maka si pemburu rente akan menikmati keuntungan berlipat-lipat karena pasar domestik beras Indonesia hanyalah kebanjiran beras kulaitas buruk tersebut.

Benar bahwa kebijakan larangan impor tidak populer dalam skema liberalisasi perdagangan dunia saat ini, dibandingkan misalnya dengan skema tarif, pajak impor atau kuota tarif yang masih dibenarkan dalam ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sejak tahun 2004, Indonesia telah menjadi “incaran” khusus Thailand dan Vietnam sebagai produsen beras yang merasa dirugikan dan harus bekerja keras setelah larangan impor diberlakukan. Tapi, langkah yang tidak populer tersebut ternyata telah membantu meningkatkan harga hual gabah petani, yang mencapai rata-rata Rp 1.552 per kilogram pada bulan Agustus 2005 atau jauh di atas harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) yang ditetapkan sebesar Rp 1.330 per kilogram. Fenomena ini merupakan salah satu dari “berita baik” dibandingkan dengan kinerja harga petani 2-3 tahun lalu yang selalu jatuh di bawah harga dasar.

Apabila impor beras tersebut hanyalah menyebabkan kesengsaraan pada petani, sebagai konstituen terbesar dalam sektor pertanian, maka telah hampir dapat dipastikan bahwa petani akan kehilangan simpati bagi pemerintah saat ini. Masyarakat, minimal menjadi apriori dan skeptis terhadap kinerja pemerintah yang telah diberi amanat untuk menjalankan kewajiban untuk melakukan manajemen impor beras dan bahan pangan lain sebaik-baiknya. Apalagi secara politis, “keberhasilan” Indonesia mencapai swasembada beras pada pertengahan tahun 1980-an tersebut sering dijadikan romantisasi *bench-mark* keberhasilan kebijakan pangan nasional. Terlalu mahal biaya politik yang ditanggung Presiden SBY apabila kontroversi impor beras bergulir menjadi kampanye negatif tentang kredibilitas dan kesungguhan pemerintah dalam membela kepentingan petani.

(4) *Beras Sangat Sensitif Secara Politik*

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, namun komoditas beras masih terlalu sulit melepaskan diri dari karakter sejarah dan perkembangannya sebagai komoditas yang sangat sensitif secara politik. Di tengah suhu politik yang meninggi seperti saat ini, keputusan pencabutan larangan impor dapat dengan mudah dibawa ke ranah politik dan digulirkan *image* bahwa pemerintah telah tidak peduli terhadap nasib petani. Apabila citra buruk telah disebar, tentu lebih mahal bagi pemerintah untuk merevisi dan memperbaikinya karena telah terlanjur menjadi makanan empuk “kalangan oposisi” yang konon menjadi kekuatan penyeimbang demokrasi. Sejarah pergantian pemimpin politik Indonesia sangat kental berhubungan dengan ketidakmampuan memecahkan persoalan harga pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, membaiknya harga gabah sejak tahun ini seakan menjadi pelepas dahaga bagi petani yang selama ini harus menanggung beban hidup sehari-hari yang semakin berat. Harga panen yang baik pastilah menjadi insentif berharga untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, terutama ketika perubahan teknologi pertanian mengalami stagnansi secara signifikan di awal millennium sekarang. Pencabutan larangan impor beras dapat dikatakan bertentangan dengan semangat membela petani tersebut, dan terlebih lagi seakan tidak mendukung strategi revitalisasi pertanian yang telah dicanangkan Presiden SBY tanggal 11 Juni 2005.

Apabila Presiden SBY serius ingin menjalankan strategi revitalisasi pertanian, maka perlu langkah awal integrasi kebijakan pangan ke dalam kebijakan ekonomi secara makro. Hal tersebut dapat dimulai dengan upaya akselerasi pembangunan pedesaan dengan fokus kepentingan golongan pendapatan rendah. Dimensi pembangunan yang berorientasi pemerataan ini sangat relevan dengan pembangunan yang berdimensi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Akselerasi pembangunan pedesaan dapat ditunjang oleh peningkatan aksesabilitas masyarakat pedesaan, khususnya golongan pendapatan rendah, terhadap sumberdaya pembangunan pertanian seperti lahan dan kredit. Disamping itu, strategi pembangunan pedesaan yang mengarah pada penciptaan dan peningkatan kesempatan kerja, transfer pendapatan yang seimbang dan stabilitas suplai bahan pangan masih tetap kompatibel dengan dimensi peningkatan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.

Dalam ranah politik, *image* yang lebih buruk dapat juga terjadi, apabila instansi pemerintah sendiri seakan melakukan “retalisasi” atau saling-balas dalam perumusan kebijakan karena Departemen Pertanian telah berkali-kali membahas kemungkinan kenaikan harga referensi beras

HDPP dan akan merevisi Inpres 2/2005 tentang kebijakan perberasan, untuk menyesuaikan dengan laju inflasi yang bergerak nyaris tanpa kendali. Upaya peningkatan HDPP merupakan konsekuensi logis dari membaiknya harga gabah petani akhir-akhir ini, karena HDPP yang ditetapkan di bawah harga pasar hanya akan merefleksikan kebodohan kebijakan saja. Konon, harga gabah kering panen (GKP) menjadi sekitar Rp 1.700 per kilogram, suatu peningkatan yang sangat signifikan dan mungkin akan membawa dampak inflatoir yang kontraproduktif. Harga referensi beras mungkin hanya akan dinaikkan sedikit saja, agar kebijakan yang baru nanti dapat mengurangi disparitas harga gabah petani dan harga eceran beras.

Sebagai penutup, kasus impor beras ini adalah salah contoh dari kecelakaan atau kekacauan perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi yang tidak dilakukan berdasarkan teknik-teknik analisis obyektif memadai sebagai prasyarat wajib dalam suatu keputusan kebijakan. Penyelesaian yang harus dilakukan terhadap kasus impor beras ini tidak boleh tergesa-gesa dan emosional, misalnya, dengan menyita 70 ribu ton beras impor yang konon telah masuk di beberapa pelabuhan dan menjadi milik negara. Ingat, kasus penyelundupan gula impor 72 ribu ton tahun lalu yang sampai saat ini tidak terdengar lagi tindak-lanjutnya. Perum Bulog, para penegak hukum dan jajaran pemerintah daerah perlu segera menakutkan masyarakat bahwa beras impor yang terlanjur masuk tersebut benar-benar hanya dipergunakan untuk mengisi stok penyanggah, seperti sejak awal menjadi justifikasi impor.

Apabila para anggota kabinet merasa berat melaksanakan – karena seakan mengakui kekacauan kebijakan yang terjadi – pernyataan arif dan tidak normatif dari Presiden SBY masih sangat diperlukan. Sementara itu, para akademisi, terutama ahli ekonomi pertanian dan statistisi harus

duduk bersama, menyelesaikan diskrepansi data produksi dan data konsumsi yang menjadi salah satu penyebab kisruh beras tersebut. Dengan kepala dingin – tanpa harus menjadi corong penguasa – saya percaya masih banyak teman-teman akademisi yang berpikiran jernih, sebagai tanggung jawab moral yang diembannya. Sebagai contoh, pada saat puncak krisis ekonomi 1998, para ahli ekonomi pembangunan khususnya peminat masalah kemiskinan telah berhasil men-sinkron-kan data garis kemiskinan beberapa kategori di dalamnya, sehingga menjadi rujukan berharga bagi langkah kebijakan pemihakan atau pemberdayaan masyarakat yang sangat dibutuhkan. ④

BAB 5.

PENUTUP

5.1. Tantangan dan masalah ke depan

Sebagaimana telah dibahas dalam beberapa bagian terdahulu, tim ekonomi KIB telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dan membawa ekonomi Indonesia menjadi sangat rentan. Sekarang kita telah memiliki tim ekonomi baru dan langkah langkah yang akan mereka kerjakan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang sangat merindukan perubahan ke arah perbaikan. Namun demikian, tampaknya tantangan dan permasalahan ekonomi ke depan masih sangat berat. Dari sisi eksternal setidaknya kita menghadapi tiga hal yaitu peningkatan suku bunga internasional, kenaikan harga minyak dunia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Dari sisi internal, masalahnya lebih berat lagi yaitu meningkatnya kemiskinan, pengangguran yang semakin banyak, meningkatnya inflasi dan suku bunga, dan kemungkinan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Kecenderungan terus meningkatnya suku bunga internasional bukanlah hal yang baru karena sudah terjadi dalam satu setengah tahun terakhir ini. Tentu, yang menjadi biang keladinya adalah kenaikan suku

bunga the Fed yang memicu kenaikan suku bunga di negara-negara maju lainnya. Sampai saat ini, tidak ada tanda-tanda bahwa the Fed akan segera menghentikan kenaikan suku bunga. Persoalannya adalah, angka inflasi di negara-negara maju masih akan meningkat akibat kenaikan harga energi. Selain itu, berdasarkan data historis, naik turunnya suku bunga the Fed memiliki siklus empat tahunan. Karena itu, setidaknya dalam dua tahun mendatang kita masih akan menghadapi tren meningkatnya suku bunga internasional.

Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada suku bunga domestik. Dalam situasi seperti ini, BI menghadapi dilema. Kalau kita tidak merespon kenaikan suku bunga internasional dengan tepat, maka akan terjadi *capital outflow* yang pada gilirannya memicu depresiasi nilai tukar rupiah. Di lain pihak, BI harus hati-hati dalam menaikkan suku bunga domestik karena akan sangat mengganggu sektor ril dan perbankan. Sungguh, tak ada pilihan yang enak.

Selain itu, masih ada kecenderungan terjadinya peningkatan harga minyak mentah dunia. Sebagian kenaikan akan dipicu oleh spekulasi, dan sebagian lagi karena peningkatan kebutuhan energi di Cina dan India. Dari hal ini kita akan kena imbas secara langsung maupun tidak langsung.

Imbas tidak langsung terutama akan terjadi melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Hal ini pada gilirannya akan mengakibatkan permintaan barang-barang ekspor menjadi melemah. Tentu hal ini sudah kita rasakan dalam bentuk melambatnya pertumbuhan ekspor ril sepanjang tahun 2005.

Imbas langsungnya tentu akan dimanifestasikan dalam bentuk kenaikan harga BBM dalam negeri tahun depan. Walaupun tim ekonomi pernah berjanji bahwa tahun depan tidak akan terjadi kenaikan harga

BBM lagi, tetapi indikasi bahwa janji itu akan dilanggar semakin kuat. Asumsi harga minyak dunia dalam RAPBN 2006 adalah USD 57 per barel, dan tampaknya tren harga minyak dunia semakin menjauh dari asumsi tersebut.

Apabila harga BBM domestik dinaikan lagi tahun depan maka akan sulit sekali untuk menjamin bahwa inflasi akan kembali *single digit*. Walaupun harga BBM tidak naik, pengendalian inflasi tetap terancam karena tarif PLN dan harga LPG sedang menunggu penyesuaian.

Tingginya inflasi saat ini yakni 18,3 persen memberikan pelajaran yang berharga. Inflasi di Indonesia bukan melulu fenomena moneter. Komponen terbesar inflasi adalah dari sisi kebijakan fiskal dan akibat risiko yang timbul oleh salah urus kebijakan ekonomi. Ketidacukupan anggaran telah memicu pemerintah mengurangi subsidi BBM. Salah perhitungan dan salah urus dalam kebijakan ekonomi telah menimbulkan risiko kebijakan yang oleh para pelaku usaha harus dikompensasi dalam bentuk kenaikan harga jual. Dalam hal ini, hampir tidak ada ruang bagi BI untuk mengendalikan inflasi dari sisi moneter.

Ekonomi kita juga sedang menghadapi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sudah terjadi sejak kenaikan harga BBM yang pertama di bulan Maret yang lalu. Dengan inflasi yang menyeruak, buruh tentunya menuntut kenaikan upah yang pada gilirannya akan memicu kenaikan biaya produksi. Hal ini diperberat oleh kenyataan bahwa harga bahan baku dan biaya transportasi juga mengalami peningkatan.

Sektor ril juga menghadapi semakin tingginya biaya bunga kredit perbankan. Investasi tentunya akan melambat sejalan dengan kenaikan suku bunga. Kondisi ini tentu menciptakan prospek pertumbuhan yang kurang menjanjikan.

Karena itu, masalah pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja tampaknya akan semakin berat. Jumlah orang miskin meningkat sebanyak empat juta orang dalam setahun terakhir ini. Tahun lalu, jumlah orang miskin hanya 36 juta orang. Sekarang jumlahnya telah mencapai 40 juta orang atau 18,6 persen dari total populasi. Kalau ditambah dengan kategori *near poor*, maka jumlahnya sekitar 70 juta jiwa. Disamping itu jumlah orang yang menganggur saat ini telah mencapai 10,8 juta orang atau meningkat sebanyak 600 ribu orang dari tahun lalu. Kalau ditambah dengan yang setengah menganggur, maka angkanya menjadi sangat fantastis yakni 41 juta orang.

Dengan kondisi seberat ini, akankah tim ekonomi yang baru tetap akan menembuh kebijakan-kebijakan yang konvensional seperti yang lalu-lalu? Kita berharap bahwa pendekatan ortodox sebaiknya ditanggalkan karena sudah terbukti tidak efektif.

5.2. Proyeksi ekonomi

Melakukan peramalan ekonomi merupakan hal yang sulit sekarang ini. Masalahnya adalah terlalu banyak tantangan dan masalah yang akan dihadapi tahun depan. Keakuratan proyeksi sangat tergantung pada seberapa akurat kita memperhitungkan beberapa variable kunci baik eksternal maupun internal yang secara signifikan akan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional. Variabel tersebut adalah harga minyak dunia, suku bunga the Fed, laju pertumbuhan ekonomi dunia, format kebijakan anggaran, nilai tukar, dan kebijakan moneter. Karena itu kita terlebih dahulu akan mengasumsikan hal-hal tersebut.

Harga minyak dunia. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan prodeksi harga minyak dunia.

Pertama, pertumbuhan ekonomi China dan India yang terus-menerus pada tingkat yang sangat menakjubkan. Peningkatan pendapatan di kedua negara tersebut akan meningkatkan permintaan energi dunia secara signifikan. Hal tersebut bukan hanya karena jumlah penduduknya mencapai 2 milyar orang, tetapi lebih dikarenakan terjadinya perubahan gaya hidup; dari tingkat konsumsi energi yang rendah menjadi menengah. Penduduk yang tadinya tidak mampu membeli kendaraan bermotor, sekarang tiap hari berkendara. Gedung dan rumah yang dilengkapi pengatur suhu menjadi bertambah banyak. Kedua, efek rumah kaca telah mengakibatkan peningkatan penggunaan energi baik di musim panas maupun musim dingin. Musim dingin semakin dingin, dan karenanya penggunaan pemanas ruangan menjadi semakin banyak. Musim panas semakin panas sehingga penggunaan AC juga semakin intensif. Karena sumber energi masih didominasi oleh bahan fosil, peningkatan pemakaian energi membuat efek rumah kaca kian bertambah. Selain itu, alternatif energi murah masih didominasi oleh batu bara yang tingkat polusinya lebih tinggi sehingga memperparah efek rumah kaca. Dalam jangka panjang, justru peningkatan pemakaian batu bara akan meningkatkan pemakaian energi secara keseluruhan. Ketiga, dalam jangka dekat ini perpindahan pemakaian energi ke sumber-sumber yang ramah lingkungan seperti energi angin, surya dan bio-energy tampaknya masih sangat lamban. Hal ini disebabkan biaya investasi dan replacement cost masih terlalu besar. Ketiga hal tersebut diperkirakan akan menyebabkan harga minyak dunia masih berpotensi untuk meningkat di tahun depan. Kecenderungan peningkatan harga sampai saat ini masih terus berlangsung dan masih belum ada tanda-tanda yang kuat akan berakhir. Harga minyak mentah dunia diperkirakan akan berada di kisaran USD 65 s/d USD 70 per barel.

Suku bunga the Fed. Suku bunga the Fed merupakan acuan bagi pasar uang di seluruh dunia. Perubahan dalam suku bunga tersebut selalu mendorong penyesuaian di pasar uang dan pasar modal secara serentak. Keterlambatan penyesuaian suku bunga dalam negeri, biasanya mengakibatkan volatilitas di pasar valuta dan pasar modal meningkat. Karena itu perubahan dalam suku bunga the Fed dapat merupakan sumber instabilitas, jika kita gagal dalam melakukan penyesuaian secara tepat. Adalah penting untuk memperkirakan secara akurat berapa kenaikan yang akan dilakukan oleh the Fed. Selama satu setengah tahun terakhir ini, the Fed secara konsisten menaikkan suku bunga setiap enam minggu. Kecenderungan ini tampaknya masih akan berlanjut selama dua tahun ke depan walaupun tingkat percepatannya mungkin akan semakin rendah. Dalam setahun mendatang, kenaikan suku bunga the Fed akan berkisar antara 150 sampai dengan 200 basis point. Pada akhir tahun depan, kisaran suku bunga the Fed adalah antara 5,75 persen sampai dengan 6,25 persen.

Pertumbuhan ekonomi dunia. Permintaan ekspor dari negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dunia. Dengan kenaikan harga minyak dunia, pertumbuhan di negara-negara maju tampaknya akan mengalami perlambatan yang disertai dengan kenaikan inflasi. Laju permintaan ekspor tampaknya juga akan mengalami penurunan. Pencapaian ekspor Indonesia sangat tergantung pada kemampuan daya saing produk-produknya di pasar internasional.

Nilai tukar rupiah. Selama setahun terakhir ini, nilai tukar rupiah hampir sulit untuk dikendalikan. BI pada saat itu terlambat dalam melakukan penyesuaian suku bunga sehingga berbagai instrumen rupiah kehilangan daya tariknya. Selain itu terlalu banyak *statement* menteri yang

justru memperburuk keadaan. Pada saat ini, setelah BI melakukan langkah-langkah *transaction restraint*, nilai tukar praktis menjadi relatif terkendali. Akan tetapi, dalam setahun ke depan tampaknya masih sulit untuk mengharapkan akan terjadinya penguatan nilai tukar. Hampir tidak ada berita baik dari sisi internal maupun eksternal. Kenaikan suku bunga the Fed berpotensi menjadi sumber instabilitas terutama jika BI dan kabinet salah langkah seperti yang terjadi selama ini. Disamping itu, defisit neraca transaksi berjalan akan menekan rupiah. Laju pertumbuhan impor mungkin mengalami penurunan, tetapi masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan ekspor. Mengingat hal-hal di atas, tampaknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berikisar antara Rp 9.800 s/d 10.300 per dolar. Rentang yang cukup lebar ini sebagai indikasi adanya ketidakpastian mengenai beberapa variabel eksternal dan bagaimana BI akan bereaksi.

Inflasi. Pada tahun 2006 banyak yang memperkirakan bahwa inflasi akan kembali menembus *single digit*. Mungkin perkiraan tersebut benar. Tetapi ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan inflasi kembali menembus *double digit*. Harga LPG tampaknya akan mengalami kenaikan di tahun 2006 karena harga gas mengikuti harga minyak mentah dunia. Tarif dasar listrik juga mungkin terpaksa akan dinaikan menyusul kenaikan harga BBM domestik. TDL sampai saat ini masih belum dinaikan dan akibatnya subsidi listrik akan semakin membengkak. Bila hal ini ingin terus dipertahankan, maka PLN harus melakukan efisiensi dan melakukan *energy switching* dengan memperbesar pemakaian energi alternatif yang lebih murah. Faktor yang paling krusial dalam menentukan inflasi adalah upah buruh dan harga BBM. Di awal tahun depan, upah buruh akan naik menyusul kenaikan inflasi di tahun 2005. Hal ini tentu akan mendorong terjadinya *cost push inflation*. Walaupun pemerintah sempat menyangkal akan meningkatkan harga BBM tahun

depan, tetapi kenyataannya mungkin akan lain. Masalahnya adalah asumsi harga minyak dunia dalam APBN 2006 hanya USD 57 per barel. Padahal, kecenderungan naiknya harga minyak mentah belum ada tanda-tanda akan berhenti. Keputusan naik atau tidaknya harga BBM dalam negeri akan ditentukan pada semester ke dua tahun depan. Kalau kecenderungannya seperti yang terjadi sekarang, kemungkinan akan terjadi pembengkakan subsidi. Dana subsidi sebesar Rp 54 triliun kemungkinan akan terus menyusut begitu memasuki semester kedua. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, inflasi tahun depan diperkirakan akan berkisar antar 9 persen sampai 11 persen. Itu dengan asumsi bahwa *core inflation* masih sekitar 8 persen.

Suku bunga SBI. Pergerakan suku bunga domestik sangat tergantung pada dua hal yakni suku bunga the Fed dan *expected inflation differential*. Karena suku bunga the Fed diperkirakan akan meningkat sebesar 150 sampai 200 basis point, tampaknya agak sulit untuk mengharapkan suku bunga SBI akan turun. Selain itu, tekanan inflasi masih akan berlanjut. Menghadapi hal ini BI akan dihadapkan pada sebuah dilema. Kalau suku bunga SBI tidak dinaikan, nilai tukar akan sangat sulit untuk dikendalikan yang pada gilirannya akan menciptakan instabilitas moneter. Kalau suku bunga dinaikan, sektor ril akan terpukul sehingga NPL akan membengkak. Kedua hal tersebut, terlepas mana yang dipilih, akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya, BI akan dengan terpaksa menaikkan suku bunga. Tahun depan, suku bunga SBI akan berada pada kisaran antara 14 persen sampai 15,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tampaknya akan terjadi dalam semester pertama tahun depan. Hal tersebut merupakan akibat dari kenaikan harga BBM di bulan Oktober

yang lalu. Pelaku bisnis masih akan menunda keputusan untuk investasi sampai semester kedua untuk melihat apakah berbagai tantangan dan masalah akan mampu diatasi oleh tim ekonomi baru. Dari sisi konsumsi, melemahnya daya beli diperkirakan akan masih berlanjut sehingga menurunkan pertumbuhan konsumsi. Mungkin yang paling banyak menolong adalah konsumsi pemerintah terutama akibat *carry over* anggaran tahun 2005. Pertumbuhan ekonomi tampaknya hanya akan berkisar antara 5,3 persen sampai 5,6 persen.

Pengangguran. Masalah pengangguran merupakan hal yang tidak terpecahkan selama empat tahun terakhir ini. Masalahnya, kebijakan pemerintah masih bertumpu pada upaya stabilisasi makro. Diperkirakan paradigma ini tidak akan ditinggalkan sehingga akibatnya angka pengangguran mungkin akan terus bertambah. Paradigma ini diperparah dengan kenyataan bahwa secara fiskal tidak terdapat ruang untuk melakukan manuver. Sepertiga anggaran dihabiskan untuk bayar utang dan sepertiga juga dialokasikan untuk anggaran daerah. Kebijakan fiskal yang berorientasi untuk mengatasi masalah pengangguran menjadi tidak mungkin. Karena itu, tampaknya masalah pengangguran akan semakin parah. Diperkirakan, pada akhir tahun 2006 jumlah orang yang menganggur secara penuh akan mencapai 12 juta sampai 12,6 juta orang atau bertambah sekitar 800 ribu orang.

Tabel 5.1.
Proyeksi ekonomi makro tahun 2006

Indikator	Proyeksi
Suku bunga the Fed (persen)	5,75 s/d 6,25
Harga minyak mentah dunia (USD per barel)	65 s/d 70
Nilai tukar rupiah (Rp/USD)	9800 s/d 10300
Inflasi (persen)	9 s/d 11
Suku bunga SBI 1 bulan (persen)	14 s/d 16
Pertumbuhan ekonomi (persen)	5,3 s/d 5,6
Jumlah orang yang menganggur penuh (juta orang)	12 s/d 12,6